



2026

LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

**DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
Semester I Tahun 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KATA PENGANTAR

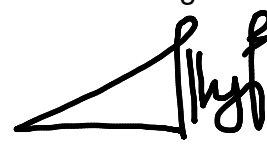
Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Penanganan Pengaduan di Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan pada Semester I Tahun 2026. Laporan Penanganan Pengaduan ini juga salah satu upaya dalam mewujudkan kesungguhan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan menjadi unit kerja yang melaksanakan reformasi birokrasi.

Laporan ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan penanganan pengaduan masyarakat sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), serta implementasi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.

Perlu ditegaskan bahwa Laporan Penanganan Pengaduan ini tidak dimaksudkan sebagai satu-satunya laporan yang digunakan sebagai acuan, akan tetapi salah satu upaya mewujudkan sistem penanganan pengaduan yang terintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kami menyadari laporan ini masih terdapat kekurangan dan memerlukan penyempurnaan, sehingga kami berharap adanya kritik, saran dan masukan konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan laporan di masa yang akan datang. Besar harapan kami agar laporan ini dapat bermanfaat bagi setiap *stakeholder*. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan.

Jakarta, 3 Juli 2026
Ketua Tim Penanganan Pengaduan



Dedhy Wibowo Setiawan, S.Pi, M.AP

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Tujuan.....	3
1.4 Saluran Pengaduan	3
BAB II GAMBARAN UMUM.....	5
2.1 Mekanisme Penanganan Pengaduan.....	5
2.2 Tim Penanganan Pengaduan	8
2.3 Pemantauan Tindak Lanjut Pengaduan.....	8
BAB III PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	10
3.1 Pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti di Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.....	10
3.2 Pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti oleh Unit Pelaksana Teknis di Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.....	13
BAB IV SARAN DAN TINDAK LANJUT.....	15
4.1 Efektivitas Mekanisme Penanganan Pengaduan.....	15
4.2 Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi	15
4.3 Saran dan Rekomendasi	15
V PENUTUP	16
LAMPIRAN	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar .1 Alur Penanganan Pengaduan SP4N-LAPOR!

Gambar .2 Grafik Penanganan Pengaduan Semester I Tahun 2026

Gambar .3 Pengelolaan Laporan Masuk Semester I Tahun 2026

Gambar .4 Sumber Laporan Penanganan Pengaduan Semester I Tahun 2026

Gambar .5 Klasifikasi Penanganan Pengaduan Semester I Tahun 2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam memenuhi hak masyarakat atas pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel. Dalam penyelenggaraan pelayanan tersebut, pengelolaan pengaduan masyarakat memegang peranan penting sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, aspirasi, kritik, maupun masukan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Pengaduan masyarakat tidak hanya menjadi media komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, tetapi juga merupakan sumber informasi yang strategis dalam mengidentifikasi berbagai permasalahan, kelemahan, maupun potensi perbaikan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan, penanganan pengaduan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja instansi. Pengelolaan pengaduan yang dilakukan secara efektif, responsif, transparan, dan akuntabel diharapkan mampu memberikan kepastian penyelesaian atas setiap pengaduan yang disampaikan masyarakat, sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan kebijakan, prosedur, maupun pelaksanaan layanan.

Peningkatan kualitas penyelesaian pengaduan menjadi kebutuhan yang semakin mendesak mengingat pengaduan masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas pelayanan publik dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah. Penyelesaian pengaduan yang tepat waktu, tepat sasaran, dan didukung oleh tindak lanjut yang efektif tidak hanya memberikan kepastian kepada pelapor, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, pencegahan terulangnya permasalahan yang sama, serta penguatan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan prima.

Sebagai bentuk akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik, setiap pengaduan yang masuk perlu ditangani secara sistematis, cepat, dan tepat.

Penanganan pengaduan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme korektif atas kekeliruan atau penyimpangan, tetapi juga sebagai sarana evaluasi untuk meningkatkan mutu layanan dan kepercayaan masyarakat.

Namun demikian, dalam upaya Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tidak menutup kemungkinan ada pejabat/pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan yang melakukan pelanggaran sehingga menghambat proses reformasi birokrasi. Hambatan - hambatan tersebut perlu segera mendapat perhatian dan diidentifikasi. Oleh karena itu, peran serta pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan untuk menyampaikan/melaporkan setiap pelanggaran yang diketahuinya sangat diperlukan.

Berdasarkan hal tersebut, penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi penting sebagai media untuk memberikan gambaran mengenai kinerja pengelolaan pengaduan selama periode pelaporan, mengidentifikasi berbagai capaian dan permasalahan yang masih dihadapi, serta merumuskan rekomendasi yang dapat dijadikan dasar bagi pengambilan kebijakan dan langkah-langkah perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan penanganan pengaduan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dalam rangka mendorong peran serta pejabat/pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dalam upaya pencegahan penyimpangan dan/atau penyalahgunaan kewenangan serta adanya kebijakan Pimpinan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan agar tercipta sistem pengawasan silang di kalangan pegawai Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Menteri Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2020 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.2 Dasar Hukum

- 1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2020 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.3 Tujuan

Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penanganan Pengaduan di Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dimaksudkan sebagai media untuk menyajikan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat selama periode pelaporan. Laporan ini menjadi instrumen dalam menilai efektivitas penyelenggaraan penanganan pengaduan pada unit kerja, sekaligus memberikan gambaran mengenai tingkat kepatuhan terhadap ketentuan, standar operasional prosedur, dan target kinerja yang telah ditetapkan.

Selain itu, laporan ini dimaksudkan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam melakukan pembinaan, pengambilan keputusan, serta penyusunan kebijakan dan strategi peningkatan kualitas sistem pengelolaan pengaduan secara berkelanjutan, sehingga tercipta pelayanan publik yang lebih responsif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, laporan ini juga disusun dalam rangka untuk mengetahui efektivitas penanganan pengaduan serta untuk mengidentifikasi faktor – faktor pendukung ataupun penghambat yang dilakukan di Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.

1.4 Saluran Pengaduan

- 1) Pengaduan disampaikan melalui aplikasi *Whistleblowing System* KKP dengan alamat: wbs.kkp.go.id ;
- 2) Website dengan laman <https://prod.lapor.go.id/> ;
- 3) Pesan singkat elektronik (SMS) dengan format : KKP (spasi) isi aduan, kirim ke nomor 1708;
- 4) Pengaduan disampaikan langsung kepada Petugas *Help Desk* di Sekretariat Tim Penanganan Pengaduan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan alamat: Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Direktorat Jenderal Pengelolaan

Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Gedung Mina Bahari III Lantai 11, Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta 10110;

- 5) Pengaduan disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Gedung Mina Bahari III Lantai 11, Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta 10110;
- 6) Pengaduan disampaikan secara tertulis melalui surat elektronik ke alamat: pengaduanprl@kkp.go.id;

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 Mekanisme Penanganan Pengaduan

Mekanisme penanganan pengaduan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan diselenggarakan secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan untuk memastikan setiap pengaduan masyarakat ditangani secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. Penanganan pengaduan dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang dimulai sejak pengaduan diterima hingga dinyatakan selesai dan ditutup, dengan melibatkan unit pengelola pengaduan serta unit kerja yang memiliki kewenangan sesuai substansi pengaduan.

Setiap tahapan dalam mekanisme penanganan pengaduan memiliki fungsi dan tanggung jawab yang jelas guna menjamin efektivitas proses penyelesaian serta memberikan kepastian tindak lanjut kepada masyarakat. Adapun mekanisme penanganan pengaduan terdiri atas tahapan sebagai berikut.

a. Penerimaan Pengaduan

Tahap penerimaan merupakan proses awal dalam pengelolaan pengaduan, yaitu menerima setiap pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat melalui berbagai kanal pengaduan yang telah disediakan, baik secara elektronik maupun non-elektronik. Pengaduan yang diterima selanjutnya dicatat dalam sistem pengelolaan pengaduan untuk memperoleh nomor registrasi sebagai dasar proses penanganan lebih lanjut.

b. Verifikasi Pengaduan

Setelah pengaduan diterima, dilakukan proses verifikasi untuk memastikan kelengkapan administrasi, kejelasan identitas pelapor (apabila diperlukan), substansi pengaduan, serta kesesuaian kewenangan penanganannya. Pada tahap ini juga dilakukan penelaahan terhadap informasi dan bukti pendukung yang disampaikan guna menentukan apakah pengaduan dapat diproses lebih lanjut, memerlukan kelengkapan tambahan, atau berada di luar kewenangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga perlu diteruskan kepada instansi yang berwenang.

c. Disposisi Pengaduan

Pengaduan yang telah memenuhi persyaratan selanjutnya didisposisikan kepada unit kerja yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan substansi pengaduan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Proses disposisi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pengaduan ditangani oleh unit yang tepat sehingga proses penyelesaian dapat dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Tindak Lanjut Pengaduan

Unit kerja yang menerima disposisi melakukan penelaahan terhadap substansi pengaduan, mengumpulkan data dan informasi pendukung, melakukan klarifikasi apabila diperlukan, serta mengambil langkah-langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, unit kerja dapat berkoordinasi dengan unit lain apabila substansi pengaduan memerlukan penanganan lintas fungsi atau lintas kewenangan.

e. Penyelesaian Pengaduan

Tahap penyelesaian merupakan proses penyampaian hasil penanganan pengaduan berdasarkan hasil pemeriksaan, klarifikasi, atau tindakan yang telah dilakukan oleh unit kerja terkait. Hasil penyelesaian disusun secara jelas, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta didukung oleh data dan bukti yang memadai. Penyelesaian pengaduan diupayakan dilaksanakan sesuai dengan standar waktu penyelesaian yang telah ditetapkan untuk memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat.

f. Penutupan Pengaduan

Setelah hasil penyelesaian disampaikan kepada pelapor atau status penyelesaian telah dinyatakan selesai sesuai ketentuan, pengaduan ditutup dalam sistem pengelolaan pengaduan. Sebelum dilakukan penutupan, seluruh dokumen pendukung, hasil tindak lanjut, dan informasi penyelesaian dipastikan telah terdokumentasi dengan baik sebagai bagian dari arsip

pengelolaan pengaduan. Data pengaduan yang telah ditutup selanjutnya menjadi bahan monitoring, evaluasi, analisis tren pengaduan, serta dasar penyusunan rekomendasi perbaikan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Melalui mekanisme tersebut, diharapkan setiap pengaduan masyarakat dapat ditangani secara konsisten, transparan, akuntabel, dan tepat waktu. Selain memberikan kepastian penyelesaian kepada masyarakat, mekanisme penanganan pengaduan juga menjadi sarana bagi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memperoleh masukan yang konstruktif dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan mendorong terwujudnya budaya perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).

Gambar 1. Alur Penanganan Pengaduan Melalui SP4N-LAPOR!



2.2 Tim Penanganan Pengaduan

Tim Penanganan Pengaduan mempunyai tugas:

- 1) Melakukan koordinasi Penanganan Pengaduan dengan Tim Penanganan Pengaduan (TPP) Kementerian dan TPP UPT;
- 2) Memberikan respon awal terhadap penyelesaian Pengaduan sesuai kewenangannya;
- 3) Memantau tindak lanjut penyelesaian Pengaduan sesuai kewenangannya;
- 4) Melakukan komunikasi, koordinasi, dan pemberian informasi penyelesaian Pengaduan sesuai kewenangannya;
- 5) Mengumpulkan bahan dan keterangan yang relevan dengan Pengaduan;
- 6) Menerima Pengaduan untuk disampaikan kepada Admin UPP Unit Kerja Eselon I;
- 7) Melakukan verifikasi lanjutan atas Pengaduan;
- 8) Melakukan telaah atas Pengaduan yang diterima;
- 9) Menyampaikan hasil telaah dan pengumpulan bahan dan keterangan dalam bentuk rekomendasi tindak lanjut penyelesaian Pengaduan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I;
- 10) Melakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal terkait hasil pengumpulan bahan dan keterangan;

2.3 Pemantauan Tindak Lanjut Pengaduan

- 1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan c.q. Tim Kerja Sumberdaya Manusia Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan melakukan penyelesaian, pemantauan dan/atau evaluasi pelaksanaan tindak lanjut laporan pengaduan yang diterima Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
- 2) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan c.q. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan melakukan pemantauan dan/atau evaluasi pelaksanaan tindak lanjut penyelesaian laporan pengaduan yang dilakukan oleh Unit Eselon II terkait;
- 3) Suatu pengaduan dinyatakan selesai jika:
 - a. Pengadu mencabut pengaduan;
 - b. Pengadu menyatakan puas atas konfirmasi atau jawaban yang diberikan Tim Penanganan Pengaduan kepada Pengadu;

- c. Pengadu tidak merespon konfirmasi hasil tindak lanjut dari Tim Penanganan Pengaduan dalam 14 (empat belas) hari kalender setelah konfirmasi dilakukan;
- 4) Dalam hal Pengadu meminta penjelasan mengenai perkembangan dan/atau tindak lanjut atas laporan pengaduan yang disampaikan, Pengadu dapat menghubungi Tim Penanganan Pengaduan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gedung Mina Bahari III Lantai 11, Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta 10110;
- 5) Dalam rangka kegiatan pemantauan dan evaluasi serta untuk memberikan jawaban atas pertanyaan pihak Pengadu, Tim Penanganan Pengaduan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan sistem pemantauan setiap semesteran atas pelaksanaan penanganan pengaduan.

BAB III PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

3.1 Pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti di Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan

Selama periode Semester I (Januari - Juni) Tahun 2026 Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan menerima pengaduan dan konsultasi permintaan informasi melalui aplikasi LAPOR! dan media sosial *WhatsApp*. Seluruh pengaduan dan konsultasi yang masuk telah diselesaikan dengan berkoordinasi dengan unit kerja terkait.

Pengaduan dan permintaan informasi yang masuk melalui websiter LAPOR! sebanyak 5 (lima), dari total 5 pengaduan yang masuk melalui website LAPOR!, pengaduan yang masih dalam proses tindak lanjut sebanyak 1 (satu) laporan, yang masuk melalui media *WhatsApp* dan telah di integrasikan ke aplikasi LAPOR! sebanyak 82 (delapan puluh dua), serta permintaan laporan dan konsultasi yang berasal dari media *WhatsApp* sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) sehingga total pengaduan/permintaan informasi serta konsultasi yang masuk dan di berbagai saluran sebanyak 218 (dua ratus delapan belas) laporan.

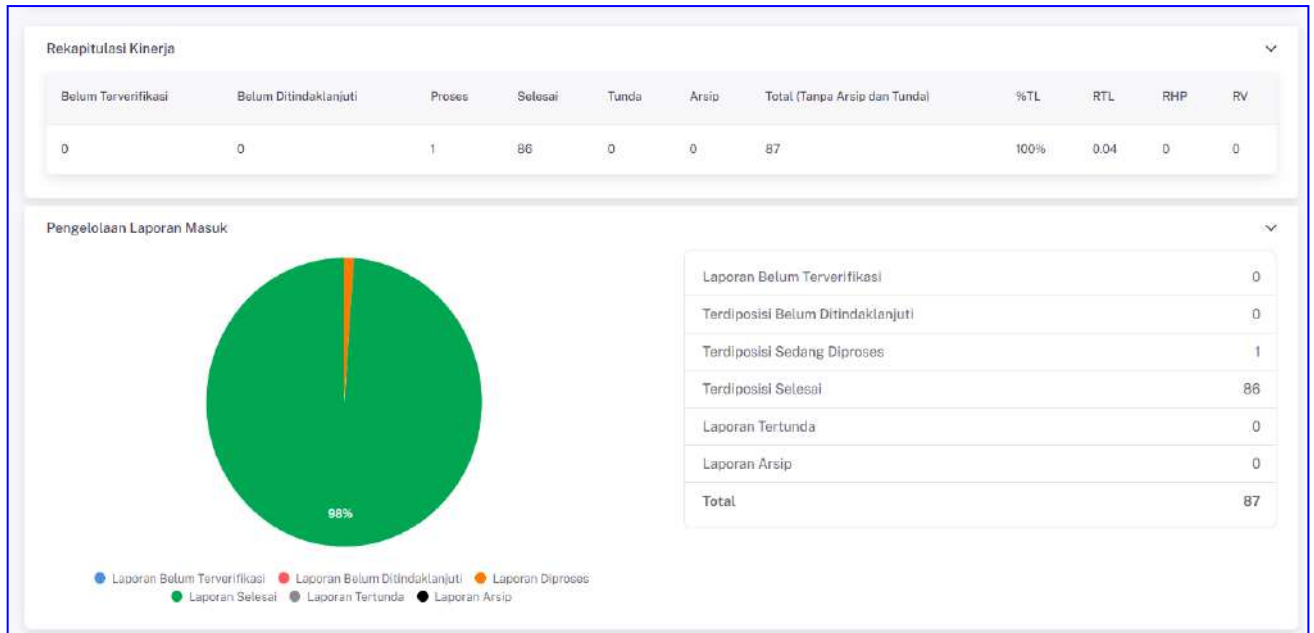
Tabel 1. Rekapitulasi Pengaduan Semester I Tahun 2026

Periode	LAPOR!	WhatsApp	Total
Januari – Juni	87	131	218

Gambar 2. Grafik Penanganan Pengaduan Semester I Tahun 2026

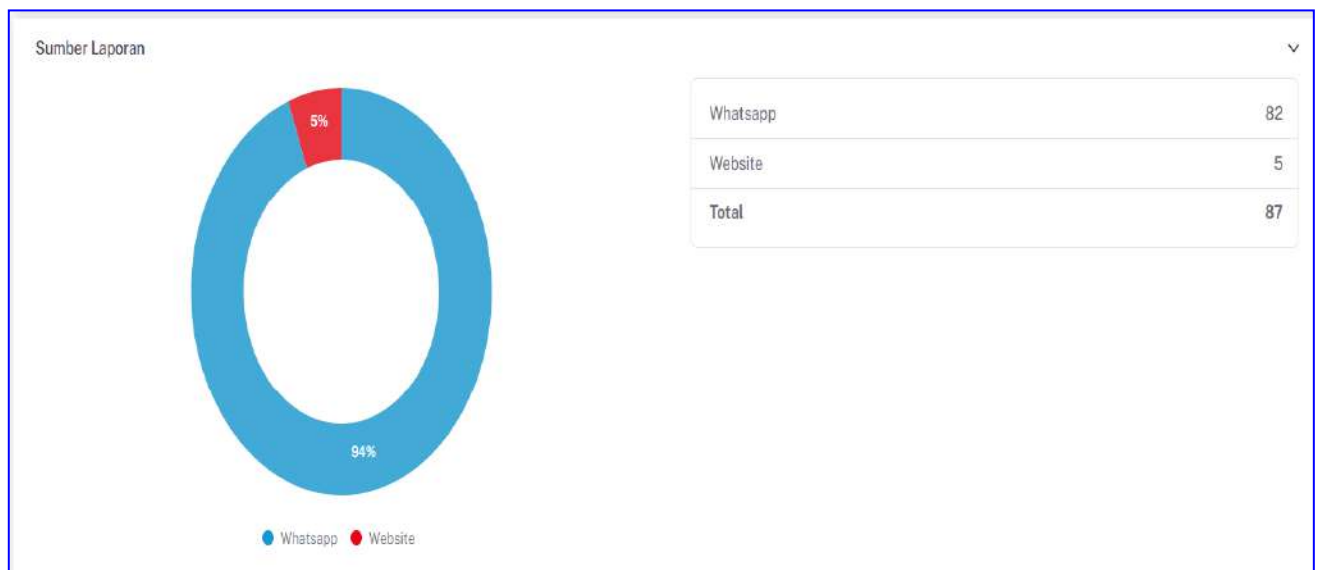


Gambar 3. Pengelolaan Laporan Masuk Semester I Tahun 2026



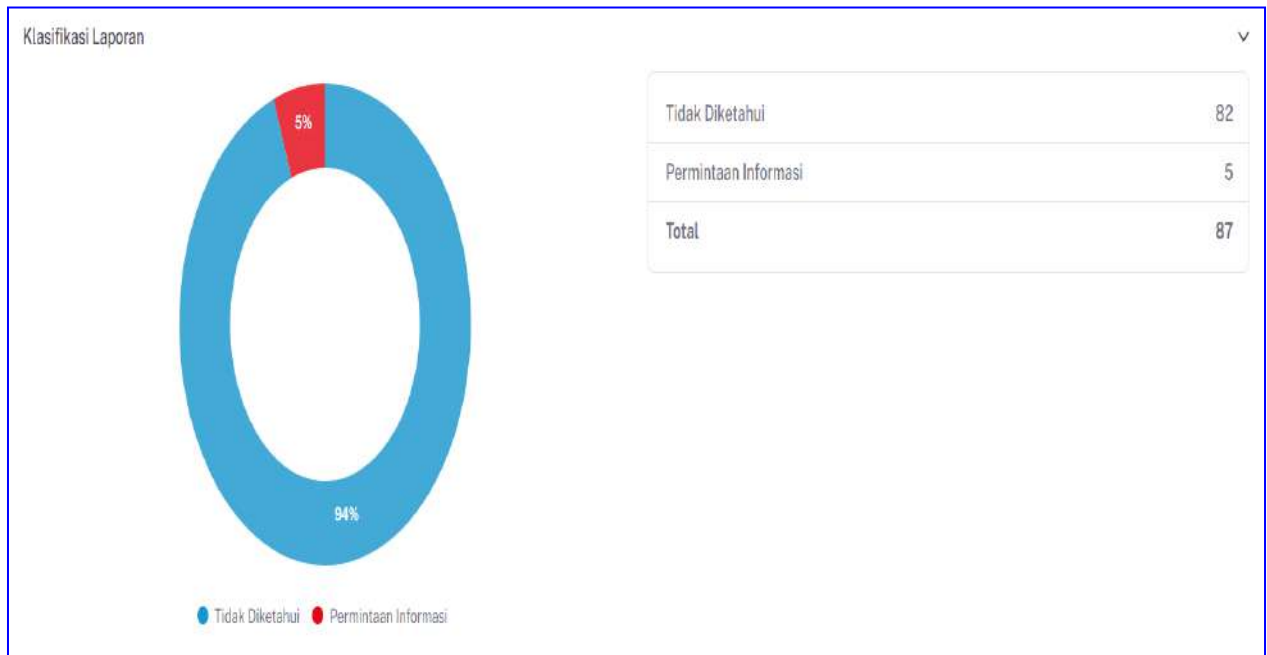
sumber : web LAPOR!

Gambar 4. Sumber Laporan Penanganan Pengaduan Semester I Tahun 2026



sumber : web LAPOR!

Gambar 5. Klasifikasi Penanganan Pengaduan Semester I Tahun 2026



sumber : web LAPOR!

3.2 Pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti oleh Unit Pelaksana Teknis di Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan

Penanganan pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan khususnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dilaksanakan secara berjenjang dan terintegrasi sesuai dengan kewenangan masing-masing unit kerja. Pengaduan yang diterima melalui kanal resmi, baik melalui SP4N-LAPOR!, website, surat, maupun media pengaduan lainnya, tidak seluruhnya ditindaklanjuti oleh unit kerja di tingkat pusat. Pengaduan yang substansinya berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) wajib diteruskan kepada UPT yang berwenang untuk dilakukan verifikasi, pemeriksaan, serta penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelibatan UPT dalam proses penanganan pengaduan merupakan bagian dari penerapan prinsip desentralisasi kewenangan, di mana penyelesaian pengaduan dilakukan oleh unit yang paling memahami substansi permasalahan dan memiliki kewenangan operasional di lapangan. Dengan mekanisme tersebut, proses klarifikasi, pengumpulan data dan fakta, serta penyusunan tindak lanjut dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan komprehensif.

Unit kerja di tingkat pusat berperan sebagai koordinator dan pengendali pelaksanaan penanganan pengaduan, yang meliputi proses penerimaan, verifikasi awal, disposisi kepada unit yang berwenang, pemantauan perkembangan tindak lanjut, serta memastikan bahwa setiap pengaduan memperoleh penyelesaian sesuai dengan standar pelayanan dan jangka waktu yang telah ditetapkan. Sementara itu, UPT bertanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap substansi pengaduan, menyusun hasil telaah, melakukan tindakan korektif apabila diperlukan, serta menyampaikan hasil penyelesaian kepada unit pengelola pengaduan untuk diunggah ke dalam sistem SP4N-LAPOR!.

Melalui mekanisme tersebut, penyelesaian pengaduan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi pelaporan, tetapi juga memastikan bahwa setiap permasalahan yang terjadi di lapangan ditindaklanjuti langsung oleh unit pelaksana yang bertanggung jawab. Dengan demikian, kualitas penyelesaian pengaduan menjadi lebih akurat, akuntabel, dan mampu memberikan solusi yang sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Oleh karena itu, keberhasilan penyelenggaraan penanganan pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sangat bergantung pada sinergi antara unit kerja di tingkat pusat dan seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT). Koordinasi yang efektif, komunikasi yang berkesinambungan, serta komitmen setiap unit dalam menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya merupakan faktor penting dalam mewujudkan sistem pengelolaan pengaduan yang responsif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pengaduan masyarakat yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan ditindaklanjuti oleh Tim Penanganan Pengaduan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Tim Penanganan Pengaduan Unit Kerja Eselon I dan Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, selain itu juga terdapat beberapa pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Unit Pelaksana Teknis terkait di Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan. Hal tersebut sejalan dengan mekanisme pada SOP Penanganan Pengaduan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, yang menempatkan unit pengelola di tingkat pusat sebagai koordinator dan pengendali proses, sedangkan UPT sebagai pelaksana penyelesaian substansi pengaduan sesuai kewenangannya. Pendekatan ini menegaskan bahwa tanggung jawab penyelesaian pengaduan melekat pada seluruh unit kerja, bukan hanya pada unit pengelola pengaduan di tingkat pusat.

BAB IV SARAN DAN TINDAK LANJUT

4.1 Efektivitas Mekanisme Penanganan Pengaduan

Secara umum, mekanisme penanganan pengaduan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah dilaksanakan sesuai dengan alur yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP), mulai dari tahap penerimaan, verifikasi, disposisi, tindak lanjut, penyelesaian, hingga penutupan pengaduan melalui sistem SP4N-LAPOR! maupun kanal pengaduan lainnya. Penerapan mekanisme tersebut memberikan kepastian proses penanganan, memperjelas pembagian tugas setiap pelaksana, serta mendukung terciptanya proses penanganan pengaduan yang transparan dan akuntabel.

Efektivitas mekanisme penanganan pengaduan tercermin dari kemampuan unit pengelola dalam menerima, memverifikasi, dan mendistribusikan pengaduan kepada unit kerja yang berwenang secara tepat waktu. Selain itu, pemanfaatan sistem SP4N-LAPOR! telah meningkatkan kemudahan dalam pencatatan, pemantauan status penyelesaian, serta penyampaian hasil tindak lanjut kepada pelapor secara lebih terstruktur.

4.2 Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi

Tidak terdapat saran dan rekomendasi pada periode pelaporan penanganan pengaduan sebelumnya, sehingga tidak ada tindak lanjut dari rekomendasi sebelumnya.

4.3 Saran dan Rekomendasi

Saran/Rekomendasi perbaikan bertujuan untuk menindaklanjuti permasalahan pada penanganan pengaduan lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penerapan penanganan pengaduan pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan. Pada Triwulan I Tahun 2026 tidak terdapat saran/rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti pada periode selanjutnya.

V PENUTUP

Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penanganan Pengaduan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan pengaduan sekaligus sebagai instrumen evaluasi untuk mengukur efektivitas penyelenggaraan penanganan pengaduan pada seluruh unit kerja. Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, diperoleh gambaran mengenai kinerja penanganan pengaduan, tingkat kepatuhan terhadap mekanisme dan standar operasional prosedur, serta berbagai tantangan yang masih dihadapi dalam proses penyelesaiannya.

Berdasarkan hasil monitoring selama periode pelaporan, secara umum penyelenggaraan penanganan pengaduan telah berjalan dengan baik sesuai mekanisme yang berlaku. Proses penanganan pengaduan telah dilaksanakan mulai dari tahap penerimaan, verifikasi, disposisi, tindak lanjut, penyelesaian, hingga penutupan melalui sistem SP4N-LAPOR! dan kanal pengaduan resmi lainnya. Sinergi antara unit pengelola pengaduan di tingkat pusat dengan unit kerja teknis, termasuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), telah mendukung penyelesaian pengaduan sesuai dengan kewenangan masing-masing sehingga setiap pengaduan dapat ditindaklanjuti secara lebih efektif dan tepat sasaran.

Pada akhirnya, penyelenggaraan penanganan pengaduan bukan hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bagian penting dari upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Oleh karena itu, hasil monitoring dan evaluasi ini diharapkan menjadi dasar dalam memperkuat tata kelola penanganan pengaduan, mendorong budaya perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*), serta mendukung terwujudnya pelayanan publik yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

LAMPIRAN

FORMAT REKAPITULASI PENANGANAN PENGADUAN
 DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
 PERIODE BULAN JANUARI 2026

No	ID Tracking	Sumber Pengaduan	Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Data Pengadu	Penanganan		Tindakanlanjut		Tanggal Tindakanlanjut	Keterangan
							Verifikator	Penelaah	Uraian	Status		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
1		WhatsApp	3 Januari 2026	Permintaan Informasi	Permohonan Info Status Verifikasi Dokumen pertambangan rakyat manual di PPKPR Laut Yth. Tim PPKPR Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Saya : KARMILA ASIKI NKU : 202511-2322-0048-6578-401 Mohon info status verifikasi dokumen yang sudah diajukan ke PPKPR Laut. Belum ada update sampai sekarang. Tolong bantuannya karena kami mengambil kerikil di pinggir pantai menggunakan tangan ataupun secara manual tanpa alat apapun. Terima kasih atas bantuannya. Hormat, KARMILA ASIKI WhatsApp 085398118716	Karmila Asiki			Baik ibu. Akan kami sampaikan melalui hotline PKKPR.L. Bisa juga disampaikan langsung ke nomor ini ya bu Setelah kami lihat di OSS, KBLI yang ibu input adalah KBLI 08103 penambangan kerikil. Sedangkan kami adalah KBLI lizin Penambangan Pasir Laut.	Selesai	3 Januari 2026	
2		WhatsApp	5 Januari 2026	Permintaan Informasi	Selamat siang pak. Kami dr Pelayanan Berusaha Dit. Sumber Daya Kelautan KKP. Izin reminder untuk pembayaran PNBP Mhn dibayarkan sebelum 3 januari 2026	PT Agro Murni			Segera di bayarkan🙏🙏	Selesai	5 Januari 2026	
3		WhatsApp	8 Januari 2026	Permintaan Informasi	Selamat Siang Bu Khususl dan Bu Afifa /team KKP, berikut terlampir , melanjutkan audiensi kami dengan pak Zaki Mahasin kemarin , berikut kami lampirkan Surat Permohonan sebgai tindak lanjut audiensi	PT Sanbe Farma			Baik pak. Kami sampaikan ke tim teknis	Selesai	8 Januari 2026	
4		WhatsApp	12 Januari 2026	Permintaan Informasi	selamat pagi pak/bu. ijin tanya untuk Izin ALSE persyaratan dokumen yang akan di Submit di OSS apa saja ya pak/bu? kami mau menyesuaikan dengan format nya OSS Contohnya di PKKPR.L kan ada 5 kamar ya 1. Rencana Usaha 2. Lokasi Usaha 3. Data Ekosistem 4. Rencana Reklamasi 5. Persyaratan Lainnya [11.03, 12/1/2026] Ifnu Nugroho Trimegah Bangun Persada obi Malut: Nah klo di ALSE apa ya pak/bu?	Trimegah Bangun Persada			Untuk PKKPR.L, Izin PKKRPL nya saja ya pak Dokumen lainnya sesuaikan urutannya sesuai outline permenkp 10/2021 ya	Selesai	12 Januari 2026	
5		WhatsApp	13 Januari 2026	Permintaan Informasi	Selamat pagi Bapak/Ibu. Terlampir izin ALSE PT.Agro Makmur Raya lokasi satu lagi. Apakah untuk izin tersebut ada PNBP nya? Mohon info nya. Atas perhatiannya diucapkan Terima kasih.	PT Agro Makmur Raya			selamat pagi pak. terima kasih sudah menghubungi pelayanan berusaha dit. SDK. ada PNBP nya, nanti kami terbitkan kode billing di tanggal 1 Mei 2026 ya pak	Selesai	13 Januari 2026	
6		WhatsApp	15 Januari 2026	Permintaan Informasi	Selamat pagi bapak/ibu, baik terma kasih atas undangannya. Izin berarti kita perlu menyiapkan bahan paparan atau seperti apa? 🙏	IPIP			betul pak. dokumen sudah siapak sesuai Permen KP10 tahun 2021 yaa	Selesai	15 Januari 2026	
7		WhatsApp	19 Januari 2025	Permintaan Informasi	Selamat pagi, perkenalkan saya Tri Oki Setiadi dari PT PLN Indonesia Power UBP Jawa Tengah 2 Adipala, mohon ijin bertanya dan konfirmasi, untuk rencana kegiatan Verlap Permohonan izin berusaha pemanfaatan ALSE di Adipala, untuk jumlah yang hadir ada berapa orang yaa pak / bu ?	PT PLN Indonesia Power UBP Jawa Tengah 2 Adipala			Selamat pagi pak. Utk kegiatan verlap adipala diundur selasa depan 27 januari ya pak. Draft surat sudah kami sampaikan ke bapak Zul. Utk surat resminya kami sampaikan menyusul	Selesai	19 Januari 2025	
8		WhatsApp	20 Januari 2026	Permintaan Informasi	Selamat Pagi Pak. barusan dicoba bs dengan username sumartono.trisnohadi@capcx.com dan pass Oss12345! Bisa pak..Captcha nya sudah diisi kah pak? Kemarin sy coba buka Mandat nya bisa.kemudian saya ganti password nya. Barusan sy coba lg masuk Mandat dgn password baru kenapa tdk bisa masuk ya Pak. CAPENV12345! Ini Password baru nya	PT Chandra Asri Pacific			Coba captcha nya di refresh dan ditulis hasil penjumlahannya ya pak	Selesai	20 Januari 2026	

9		WhatsApp	20 Januari 2026	Permintaan Informasi	Selamat sore Bapak/Ibu. Kami dari PT Budidaya Biru Berkelanjutan (JALA) ingin mengonfirmasi penyampaian surat permohonan audiensi kepada Direktur Sumber Daya Kelautan terkait Perizinan Air Laut Selain Energi (ALSE). Dalam surat tersebut kami mengusulkan pelaksanaan audiensi pada hari Rabu, 21 Januari, menyesuaikan dengan agenda Bapak Direktur. Mohon konfirmasi penerimaan surat serta arahan tindak lanjutnya. Terima kasih atas bantuannya.	JALA			kami sampaikan ke Direktur ya pak	Selesai	20 Januari 2026	
10		WhatsApp	23 Januari 2026	Permintaan Informasi	Dari PT Phoenix Resources International pak, saat ini kami sedang mengurus izin ALSE pada oss. Hanya saja ketika kami mau konsultasi via oss tidak bisa pak, Lalu apakah kami bisa konsultasi disini pak mengenai persyaratan alse?	PT Phoenix Intertational Resources			Untuk persyaratan ALSE bisa pak. Utk sistem input OSS dimana trouble nya mhn divideokan saja. Dikirim besok yaaa. Biar kami pelajari. Terima kasih	Selesai	23 Januari 2026	
11		WA Holine Perizinan Jasa Bahari	14 Januari 2026	Permintaan Informasi	Untuk PB UMKU reklamasi jika berada pada zona pelabuhan laut, apakah tetap diajukan ke KKP?	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung			Petugas menjawab pertanyaan sebagai berikut: 1. Lokasi reklamasi yang berada di zona pelabuhan DLkr/DLkp menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan. 2. Terkait kendala di OSS sudah kami sampaikan ke BKPM, menunggu antrian untuk ditindaklanjuti.	Selesai	19 Januari 2026	

FORMAT REKAPITULASI PENANGANAN PENGADUAN
 DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
 PERIODE BULAN FEBRUARI 2026

No	ID Tracking	Sumber Pengaduan	Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Data Pengadu	Penanganan		Tindaklanjut		Tanggal Tindaklanjut	Keterangan
							Verifikator	Penelaah	Uraian	Status		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
1		WhatsApp	2 Februari 2026	Permintaan Informasi	Selamat Malam, Mohon maaf mengganggu waktunya perkenalkan saya Gali Firdaus dari PT Rejeki Abadi Lestari, sehubungan dengan Penyampaian Hasil Survei Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut apakah dapat di informasikan ke kami untuk penyerahan dokumen tersebut dapat disampaikan ke siapa, terima kasih 🙏	PT Rejeki Abadi Lestari			Baik pak, sebentar kami update infonya Kpd : Dit. Sumber Daya Kelautan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementrian Kelautan dan Perikanan Gedung Mina Bahari III Lt 8, Jalan Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat 10110	Selesai	2 Februari 2026	
2		WhatsApp	2 Februari 2026	Permintaan Informasi	Siang Pak, mau tanya kami ada mau laporan ALSE bulan januari 2026 tapi di periode pelaporan hanya sampai 2025. terkait ini bagaimana ya Pak karena batas akhir laporan kami tgl 3, lewat dari itu akan kena denda. mohon bantuannya ya pak	PT Agro Murni			aplikasi mandat sdg dalam tahap pengembangan. sementara bisa tambahkan keterangan dl ya bahwa itu utk pelaporan januari 2026 pak. tahun yg dipilih bs 2025 dulu. setelah submit nanti ada menu edit bs diubah jd 2026 ya pak	Selesai	2 Februari 2026	
3		WhatsApp	4 Februari 2026	Permintaan Informasi	Selamat siang bapak/ibu Direktorat Sumber Daya Kelautan. Izin konfirmasi apakah untuk pengajuan Izin ALSE KBLI 36002 sebagai kegiatan pendukung di sistem OSS, diperlukan penambahan KBLI 36002 di akta perusahaan? Karena saat kami check di dalam sistem OSS, KBLI 36002 ini sudah tersedia otomatis, pemahaman kami di dalam akta perusahaan tidak perlu ditambahkan karena ini merupakan kegiatan pendukung, bukan utama. Terima kasih. Untuk pkkprl kami blm ada, baru akan mengajukan. Kami baru akan apply PKKPRL-nya dengan KBLI 36002. Dari PT Kalimantan Aluminium Industry, yang sempat melakukan audiensi juga beberapa waktu yang lalu. Sedang kami explore apakah yang akan apply ALSE dari kami sebagai tenant atau dari pengelola kawasan	PT Kalimantan Aluminium Industry			Mhn izin pak. Utk PKKPRL KBLI utama nya apa? Sesuai dengan PP 28 tahun 2025 dan Permen invest nomor 5, Permohonan Perizinan Berusaha izin pemanfaatan ALSE, boleh menggunakan KBLI utama, dengan catatan, titik intake dan outfall pemanfaatan ALSE berada dalam PKKPRL KBLI utama	Selesai	4 Februari 2026	
4		WhatsApp	4 Februari 2026	Permintaan Informasi	Mau tanya pengurusan pengambilan air laut utk air baku, posisi di Jawa Tengah (Pantura) sekitar Kab Kendal, debit sekitaran 200 lt / detik...	Agro murni			iyaa silahkan pak. pedoman di Permenkp 10 tahun 2021 ya pak: nanti cari KBLI 36002	Selesai	4 Februari 2026	
5		WhatsApp	4 Februari 2026	Permintaan Informasi	Selamat siang Bp/Ibu, saya mau menanyakan terkait pelaporan ALSE di tahun 2026 memang tidak ada pilihannya ya?	Inti Benua Perkasatama			nanti dipilih 2025 ya.. kemudian bisa di edit manual menjadi 2026 atau bisa juga pakai 2025 nanti di keterangannya ditulis 2026 ya	Selesai	4 Februari 2026	
6		WhatsApp	5 Februari 2026	Permintaan Informasi	Siang bu. Mau pelaporan alse bu tp tahun 2026 blm ada	Sisi			aplikasi mandat sdg dalam tahap pengembangan. sementara bisa tambahkan keterangan dl ya bahwa itu utk pelaporan januari 2026 pak tahun yg dipilih bs 2025 dulu. setelah submit nanti ada menu edit bs diubah jd 2026 ya pak	Selesai	5 Februari 2026	
7		WhatsApp	5 Februari 2026	Permintaan Informasi	Saya nofri dari PT Artha Envirotama No KBLI 36001 yg di NIB statusnya tidak/belum terverifikasi. Bagaiman proses nya agar terverifikasi?	PT Artha Envirotama			utk KBLI 36001 dan 36002 1. apabila sumber air laut, maka izin dari KKP 2. apabila sumber air dari darat (tanah atau permukaan) maka izin dari sektor PU 3. penentuan darat dan laut dilakukan melalui OSS saat pemilihan lokasi dengan koor	Selesai	5 Februari 2026	

8		WhatsApp	10 Februari 2026	Permintaan Informasi	Selamat pagi, perkenalkan saya Bambang dari Sucofindo. Mohon infonya untuk persyaratan permohonan pengajuan baru dan perpanjangan untuk izin ALSE bisa kami dapatkan dimana ya? Permohonan melalui ptsp kkp ya?	Sucofindo			untuk standar kegiatan usaha berdasarkan PermenKP 10/2021 melalui OSS	Selesai	10 Februari 2026	
9		WhatsApp	12 Febaruari 2026	Permintaan Informasi	Selamat siang, mohon ijin koordinasi untuk ijin Alse pak Untuk hatchery apakah di haruskan mengurus ijin alse ini pak? Untuk proses pengurusannya bagaimana pak. Apakah ada syarat2 khusus yang harus kami lengkapi terkebih dahulu pak	Dakwati Afifah			Selamat pagi bapak/Ibu. Nanti akan kami balas di jam kerja. Terima kasih. baik paaak. koordinasi terkait apa pak? harus pak jika ukuran debit ait kurang dari 30m3/bulan masuk kewenangan daerah. izin terbit otomatis. ika kewenangan lebih dari 30m3/bulan masuk kewenangan pusat, sesuai dengan amanat PP28/2025 1. izin dasar terpenuhi (PKKPRL dan persetujuan lingkungan) 2. izin berusaha pemanfaatan ALSE ada di Permen KP 10 tahun 2021	Selesai	12 Febaruari 2026	
10		WhatsApp	13 Februari 2026	Permintaan Informasi	Selamat pagi. Saya Eka.. Mau tanya terkait proses perizinan Pemanfaatan ALSE. Selaku lawyer,Utk proses Alse melalui OSS kan yaa. Utk persyaratannya apa saja	Eka			Selamat pagi Bu, untuk standar kegiatan usaha ada di PermenKP 10/2021	Selesai	13 Februari 2026	
11		WhatsApp	13 Februari 2026	Permintaan Informasi	Saya ingin menanyakan terkait status pnpb alse kami, di sistem hanya tertera 1 dan statusnya inactive, sedangkan kami sudah melakukan pembayaran utk tahun 2025-2026 kemarin	Lotte Chemical Titan Nusantara			izin pak, utk PNPB dibayarkan 2024 dan 2025 kan ya pak? untuk bukti bayar 2024 bisa dilampirkan ke kami? izin pak, karena tahun 2024 belum ada akun mandat, info dari katimja kami, tidak apa2. yang penting statusnya paid	Selesai	13 Februari 2026	
12		WhatsApp	13 Februari 2026	Permintaan Informasi	Selamat pagi Yth. Bapak Ibu Admin Izin saya Sabam dr DKP Kalteng Boleh minta informasi Format Permohonan Izin ALSE utk Tambak Budidaya Udang? Terima kasih	DKP Kalimantan Tengah			untuk otuline pemenuhan perizinan ada di Permen KP 10 tahun 2021 ya pak, KBLI 36002	Selesai	13 Februari 2026	
13		WhatsApp	18 Februari 2026	Permintaan Informasi	Assalamu'alaykum Mohon izin tanya...Laporan PLN Nusantara Power UP Paiton apa sudah masuk njih Bapak 🙏 Laporan ALSE Apa di kolom Realisasi Pemanfaatan Air Laut dan Jumlah Penjualan/ Penyerapan oleh Industri diisi angka yg sama atau gmn njih...	Avvand			Waslm pak. Sudah masuk pak. Utk realisasi penjualan dikosongkan saja ya pak. Atau - atau 0	Selesai	18 Februari 2026	
14		WhatsApp	20 Februari 2026	Permintaan Informasi	Selamat siang Berikut kami lampirkan dokumen perbaikan permohonan ALSE PT Trimegah Bangun Persada sesuai dengan Berita Acara Verifikasi Dokumen, terima kasih https://drive.google.com/drive/folders/12c5GrzX3es3xbqlr6Rk8Fhkx1edcAT11?usp=sharing Terima kasih bapak/ibu, sembari menunggu kami bisa upload di sistwm oss karena ada kendala saat kami ingin melakukan perbaikan data	Trimegah Bangun Persada			selamat siang. kami terima ya pak. terima kasih	Selesai	20 Februari 2026	

15		WhatsApp	20 Februari 2026	Permintaan Informasi	Selamat pagi Bapak/Ibu, perkenalkan saya Riri, izin bertanya sehubungan dengan penyusunan FS untuk Izin Pelaksanaan Reklamasi dan pengajuan KKPRL, khususnya terkait cakupan, penggabungan kegiatan, serta skema pelaksanaan dan pemanfaatannya. Mohon penjelasannya atas beberapa hal berikut: 1. Apakah FS untuk pengajuan izin pelaksanaan reklamasi yang peruntukkan utamanya adalah sebagai pulau sampah (TPST) dapat digabung dengan kajian pemanfaatan lain apabila di atas lahan reklamasi terdapat pemanfaatan lain (misalnya pergudangan), apakah harus dimasukkan dalam FS yang sama sejak awal atau dimuat dalam FS terpisah? 2. Apakah pihak yang membangun pulau reklamasi dapat berbeda dengan pihak yang membangun fasilitas di atasnya (misalnya reklamasi yang diperuntukkan sebagai TPST, pihak A yang membangun pulau dan pihak B yang akan membangun TPST)? apakah skema tersebut diperbolehkan dan apakah berpotensi menimbulkan konflik perizinan/tanggung jawab? 3. Dalam pengajuan KKPRL, apakah FS merupakan persyaratan wajib? Jika tidak, dokumen teknis apa yang dipersyaratkan? 4. Terkait cakupan FS izin pelaksanaan reklamasi, apakah harus mencakup seluruh kawasan pulau reklamasi yang dibangun (ultimate	Riri			selamat siang ibu. utk layanan perizinan izin reklamasi ada di Direktorat Jasa bahari. berikut nomor hotline nya ya	Selesai	20 Februari 2026	
16		WhatsApp	23 Februari 2026	Permintaan Informasi	Selamat pagi. Perkenalkan saya Stefen dari PT Gorontalo Listrik Perdana, sebelumnya saya sudah dengan Pak Edo KKP di BKPM dan Bu Melani di Perizinan KKP, yaitu mengenai perizinan ALSE kami yang dikeluarkan oleh Gubernur Gorontalo tetap berlaku dan dalam diskusi tersebut dari kami ingin meminta surat permohonan penegasan ALSE milik kami, di konslutansi tersebut diinfokan bahwa kami buat surat saja dan ditujukan kepada Direktur Sumber Daya Kelautan. Mohon bantuannya Bapak/Ibu untuk dapat menginfokan email Direktur Sumber Daya Kelautannya 🙏 Terima kasih banyak sebelumnya	PT Gorontalo Listrik Perdana			bisa disampaikan kepada hotline ini ya pak	Selesai	23 Februari 2026	
17		WhatsApp	25 Februari 2026	Permintaan Informasi	[16.24, 24/2/2026] Katharina Ester H PT Graha Alam Lestari: Selamat sore juga Pak/Bu Untuk yang menandatangani Berita Acara: Bpk Lisen Pribadi selaku GM Finance Terima kasih Pak 🙏🙏 [16.24, 24/2/2026] Katharina Ester H PT Graha Alam Lestari: Untuk emailnya di lisen.pribadi@kempinski.com	PT Graha Alam Lestari			Baik Bu. Terima kasih	Selesai	25 Februari 2026	
18		WA Holine Perizinan Jasa Bahari	10 Februari 2026	Permintaan Informasi	Ada pertanyaan dari pelaku usaha terkait dengan sertifikat wisata bahari ini syarat dari kelanjutan untuk Perizinan Berusaha atau harus ada Perizinan Berusaha terlebih dahulu baru PB UMKU? Terimakasih Pak/Bu	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung			Petugas menjawab pertanyaan sebagai berikut: Iya benar. Terkait wisata bahari ada rangkaian izin yang perlu diurus PKKPRRL > Persetujuan Lingkungan > PB > PB UMKU		10 Februari 2026	

19		WA Holine Perizinan Jasa Bahari	11 Februari 2026	Permintaan Informasi	Selamat siang Pak/Bu. Izin kami mau bertanya ini kan ada pb umku sertifikat wisata bahari yang masuk dan menjadi kewenangan kami karena mikro, karena ini kami baru dapat pertama kali, apakah boleh melihat semacam list yang perlu kami nilai dan dokumen2 yang harus dicek. Terimakasih Pak/Bu	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung		Petugas memberikan file checklist dokumen persyaratan izin wisata bahari menyesuaikan Permen KP 10/2021		11 Februari 2026	
20		WA Holine Perizinan Jasa Bahari	19 Februari 2026	Permintaan Informasi	izin bertanya pak, perusahaan atas nama PT. Maratua Seaview Resort, memiliki 2 pkkprl. untuk pengurusan perizinan berusaha wisata bahari di NIB dan KBLI yg sama cukup mengajukan 1 kali permohonan perizinan berusaha atau perlu 2 kali permohonan per pkkprl? kalau NKU berbeda mengurus 2 kali perizinan ya pak berarti? walaupun KBLI sama?	Balai PK Pontianak		Petugas menjawab pertanyaan sebagai berikut: 1. Untuk PKKPRL yang dipunya oleh PT. Maratua Seaview Resort dengan KBLI yang sama apakah berbeda NKU? Terkait pengajuan Izin Wisata Bahari cukup 1 kali permohonan izin saja, namun mencakup luasan area laut yang disetujui PKKPRL. 2. Jika NKU nya berbeda, pengajuan izin wisata bahari pilih salah satu KBLI dan NKU. Saat pengajuan sertakan dokumen 2 PKKPRL terbit, sehingga bisa sekaligus ruang laut yang terakomodir di surat izin wisata bahari.		19 Februari 2026	
21		WA Holine Perizinan Jasa Bahari	20 Februari 2026	Permintaan Informasi	Mohon penjelasannya atas beberapa hal berikut: 1. Apakah FS untuk pengajuan izin pelaksanaan reklamasi yang peruntukkan utamanya adalah sebagai pulau sampah (TPST) dapat digabung dengan kajian pemanfaatan lain apabila di atas lahan reklamasi terdapat pemanfaatan lain (misalnya pergudangan), apakah harus dimasukkan dalam FS yang sama sejak awal atau dimuat dalam FS terpisah? 2. Apakah pihak yang membangun pulau reklamasi dapat berbeda dengan pihak yang membangun fasilitas di atasnya (misalnya reklamasi yang diperuntukkan sebagai TPST, pihak A yang membangun pulau dan	Riri dari AGPR		Petugas menjawab pertanyaan sebagai berikut: - Entitas yang mengajukan Izin Pelaksanaan Reklamasi harus sama dengan yang mengajukan PKKPRL karena kedua perizinan tersebut diajukan melalui OSS dan satu rangkaiian (1 KBLI dan 1 NKU yang sama) - Untuk penyusunan dokumen permohonan Izin Pelaksanaan Reklamasi secara lengkap bisa dilihat dalam Permen KP Nomor 10 Tahun 2021 - Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan. Mohon setiap dokumen dan subbab nya mengikuti urutan yang ada dalam Permen KP tersebut. Termasuk penyusunan dokumen studi kelayakan (Feasibility Study) mencakup strategi pelaksanaan usaha dan kelayakan ekonomi - finansial.		20 Februari 2026	

FORMAT REKAPITULASI PENANGANAN PENGADUAN
 DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
 PERIODE BULAN MARET 2026

No	ID Tracking	Sumber Pengaduan	Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Data Pengadu	Penanganan		Tindaklanjut		Tanggal Tindaklanjut	Keterangan
							Verifikator	Penelaah	Uraian	Status		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
1		WhatsApp	5 Maret 2026	Permintaan Informasi	[11.54, 25/2/2026] +62 852-3211-8413: Selamat Pagi Bpk/Ibu, saya Ricky dari PT Port Engineering CSCEC Indonesia [12.03, 25/2/2026] +62 852-3211-8413: Izin bertanya untuk konsultasi mengenai teknis.	Engineering CSCEC Indonesia			[10.33, 5/3/2026] Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan: ini konsultasi tatap muka belum tersedia ya pak [10.57, 5/3/2026] Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan: untuk panduan bisa merujuk pada Peraturan Menteri KP 33 tahun 2023 dan Peraturan Menteri KP 3	Selesai	5 Maret 2026	
2		WhatsApp	5 Maret 2026	Permintaan Informasi	[09.32, 5/3/2026] +62 856-4836-0333: Menanyakan terkait KBLI 36001 yg di OSS masih belum terverifikasi, apa bisa dibantu? [09.33, 5/3/2026] +62 856-4836-0333: Mohon dijelaskan apa aja dokumen yg saya harus submit	PT Agro Murni			1. melakukan permohonan KKPRL dengan KBLI 36001 2. menyiapkan persetujuan lingkungan 3. melakukan permohonan perizinan berusaha pemanfaatan ALSE dengan KBLI 36001	Selesai	5 Maret 2026	
3		WhatsApp	9 Maret 2026	Permintaan Informasi	[09.54, 9/3/2026] +62 813-3123-4933: perkenalkan saya Muntia dari PT Kartanegara Energi Perkasa [09.54, 9/3/2026] +62 813-3123-4933: ijin untuk menanyakan permohonan PKKPRL Laut dengan No Permohonan : I-202602051203369634793 [09.58, 9/3/2026] +62 813-3123-4933: untuk verifikasi pemyaratannya bagaimana ya pak?	PT Kartanegara Energi Perkasa			[10.00, 9/3/2026] Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan: selamat pagi bu kami hotline perizinan berusaha sumber daya kelautan [10.00, 9/3/2026] Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan: untuk hotline PKKPRL berikut ya bu	Selesai	9 Maret 2026	
4		WhatsApp	9 Maret 2026	Permintaan Informasi	Terlampir untuk email mandat PT Semesta Alam Permai ya pak/bu	Semesta Alam Permai			Baik. Terima kasih	Selesai	9 Maret 2026	
5		WhatsApp	10 Maret 2026	Permintaan Informasi	Selamat pagi.. Saya Galih dari PT PLN Nusantara Power UP Gresik pak, untuk skema pelaporan di mandat, itu periode pelaporannya dari tanggal 1 hingga akhir bulan pelaporan ya pak ? atau di sesuaikan dengan terbitnya izin alse ?	PLN NP UP Gresik			[10.39, 10/3/2026] Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan: Silahkan lapor mandat di periode 24 desember sampai 24 januari ya pak [10.39, 10/3/2026] Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan: Begitu seterusnya	Selesai	10 Maret 2026	
6		WhatsApp	10 Maret 2026	Permintaan Informasi	[10.57, 11/3/2026] Stevanus PT Ashahimas: Selamat siang pak/bu Untuk laporan alse, dikirimkan melalui aplikasi / website apa ya? Terimakasih	PT Asahimas Chemical			[14.36, 11/3/2026] Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan: melalui Mandat pak silahkan menyampaikan email yang akan didaftarkan untuk akun mandat ya	Selesai	10 Maret 2026	
7		WhatsApp	26 Maret 2026	Permintaan Informasi	Selamat siang, ijin perkenalkan diri, nama saya Udi Iswadi dari PT Angels Products, kami sudah mengajukan perizinan ALSE dengan data sebagai berikut ANGELS PRODUCTS NKU 202204-0517-3523-4679-399 KBLI 36002 - Penampungan dan Penyaluran Air Baku, kapan kiranya dapat dilakukan verifikasi, salam hormat	PT Angels Products			[14.05, 26/3/2026] Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan: Selamat siang pak. permohonan bapak sudah masuk di panel kami. [14.05, 26/3/2026] Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan: mhn menunggu untuk proses berikutnya ya [14.05, 26/3/2026] Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan: terima kasih	Selesai	26 Maret 2026	
8		WhatsApp	27 Maret 2026	Permintaan Informasi	Izin bertanya, saya dengan Dimas dari PT Berkah Semesta Maritim, saat ini kami sudah memiliki KKPRL dengan KBLI 36002, mohon info terkait izin ALSE, cara permohonan dan dokumen apa saja yang diperluka 🙏 Kegiatan Usaha KBLI 36002 tersebut sebagai Kegiatan Usaha Pendukung, dan risikonya menengah rendah, apakah memerlukan Izin Alse?				Berikut Permenkp 10 tahun 2021 nanti bisa cari KBLI 36002 ya pak Selamat pagi. Tetap memerlukan izin pemanfaatan ALSE pak Nanti di OSS ketika mengajukan permohonan ada step2 yang perlu diisi pak. Seperti wilayah usaha, modal usaha, dan resiko usah	Selesai	27 Maret 2026	
9		WhatsApp	30 Maret 2026	Permintaan Informasi	Mau menanyakan SKKNI itu kami agak kebingungan buk. Barangkali ada contoh sertifikasi seperti apa yang dimaksud? Andai perusahaan belum memiliki tenaga tersertifikasi sebagaimana yang diharuskan seperti apa solusinya??				untuk tenaga ahli yang di Samben kan ada tuh pak.. cuma sudah exp. diperpanjang aja pak. jika masih proses perpanjangan, lampirkan surat permohonan perpanjangan	Selesai	30 Maret 2026	
10		WhatsApp	31 Maret 2026	Permintaan Informasi	Assalammualikum pak , selamat pagi perkenalkan saya herry dari LPK Pekanbaru satpel aceh, ijin mau bertanya pak terkait teknis verifikasi lapang ALSE PT.PLN di nagan raya bagaimana ya pak , mohon arahan nya pak 🙏				Posisinya teman2 SDK akan berangkat ke nagan raya [Apakah bapak juga berkenan hadir?	Selesai	31 Maret 2026	

11		WA Holine Perizinan Jasa Bahari	9 Maret 2026	Permintaan Informasi	Ijin bertanya terkait pengurusan izin pelaksanaan reklamasi untuk pelaksanaan reklamasi di daerah saat ini apakah kewenangannya masih di DKP Provinsi atau sudah melalui Dit. Jasa Bahari KKP Pusat?	PT Bintang delapan Mineral			Petugas memberikan jawaban sebagai berikut: Untuk kewenangan izin pelaksanaan reklamasi disesuaikan dengan skala usaha dan lokasi usaha pemrakarsa sebagaimana gambar yang diberikan melalui WA. Skala usaha besar dan berada di KSN, KSNT, dan lintas provinsi masuk kewenangan Pusat (Menteri), sementara skala usaha mikro dan diluar kawasan menjadi kewenangan Gubernur.	Selesai	9 Maret 2026	
----	--	---------------------------------	--------------	----------------------	--	----------------------------	--	--	--	---------	--------------	--

FORMAT REKAPITULASI PENANGANAN PENGADUAN
 DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
 PERIODE BULAN APRIL 2026

No	ID Tracking	Sumber Pengaduan	Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Data Pengadu	Penanganan		Tindaklanjut		Tanggal Tindaklanjut	Keterangan
							Verifikator	Penelaah	Uraian	Status		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
1		WhatsApp	04/07/2026	Permintaan Informasi	Assalamu'alaikum wr. wb. Selamat Pagi Dit. SDK KKP. Perkenalkan kami dari PT Sumber Segara Primadaya PLTU Cilacap, bahwa kami sudah melakukan pengajuan perizinan berusaha ALSE dan sudah sampai pada pelaksanaan verifikasi lapangan pada tanggal 31 Maret 2026 yg dihadiri oleh Bp. Iqbal, Bp. Puguh dan ibu Melani. Dengan ini kami bermaksud meminta waktu dan kesempatannya kepada Dit. SDK KKP untuk dilakukan asistensi terhadap dokumen perizinan ALSE yg sudah kami buat. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. Wassalamu'alaikum wr. wb.	PT Sumber Segara Primadaya PLTU Cilacap			Waslm pak. Baik akan segera kami jadwalkan dan kami sampaikan kepada pimpinan.	Selesai	04/07/2026	
2		WhatsApp	04/09/2026	Permintaan Informasi	[09.53, 9/4/2026] +62 812-1814-802: Selamat Pagi Perkenalkan, saya Ridwan dari PT Cirebon Electric Power, kami sudah mendapatkan izin PKKPRL, skrg mau proses izin ALSE. mohon dibantu panduan di OSS nya bagaimana? Baik pak. Apakah semua persyaratan dokumen	PT Cirebon Electric Power			Baik pak. Apakah semua persyaratan dokumen ALSE sudah lengkap pak? Berikut kami kirimkan outline Permen KP 10/ 2021 [10.24, 9/4/2026] Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan: Jika ada pertanyaan mengenai outline boleh konsultasi dulu ke kami sebelum upload dokumen ya Nanti jika dokumen sudah lengkap, di OSS lanjut aja klik	Selesai	04/09/2026	
3		WhatsApp	04/09/2026	Permintaan Informasi	[11.30, 9/4/2026] +62 878-8082-4646: mohon bantuannya Bu, telah kami input perbaikan dari bulan februari 🙏 [namun belum berubah statusnya Permohonan KKPRL PLN KBLI 36002 No Permohonan : I-202602181119313463524 Status: menunggu Verifikasi K/L	-			[11.31, 9/4/2026] Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan: Ini KKPRL ya bu [11.31, 9/4/2026] Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan: Sedangkan kami perizinan Berusaha pemanfaatan ALSE	Selesai	04/09/2026	
4		WhatsApp	04/10/2026	Permintaan Informasi	[09.02, 10/4/2026] Johan PT. Sari Dumai Sejahtera: Selamat pagi pak/bu Sekedar info, kami ada kekeliruan input data pengajuan izin ALSE untuk PT Semesta Alam Permai, mohon untuk dapat diabaikan 🙏 Nanti kami akan ajukan surat Rollback ke BKPM dan akan melampirkannya ke bapak/bu sebagai referensi Kami testing sistem aja sih bu tadinya. Jadi bisa diabaikan/ditolak saja. Nanti kami akan bersurat	PT Semesta Alam Permai			[09.26, 10/4/2026] Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan: Selamat pagi. Baik pak.terima kasih informasinya Ini kekeliruan inputnya seperti apa pak?	Selesai	04/10/2026	
5		WhatsApp	04/10/2026	Permintaan Informasi	[15.50, 10/4/2026] +62 813-3123-4933: Selamat sore ijin pak/bu kami ingin bertanya untuk pipa pembuangan air laut yang telah digunakan sebagai pendingin, untuk kegiatan pendukung PLTGU [16.19, 10/4/2026] +62 813-3123-4933: Skrg kami sedang proses permohonan pkkprl tapi untuk yg pipa intake [16.20, 10/4/2026] +62 813-3123-4933: Untuk pengajuan yg outfall ini bisa saya ajukan bersamaan? Kalau bersamaan terlalu luas areannya pak Kegiatan utamanya Pembangki listrik pak	-			Betul. Perlu izin ALSE bu. Semua proses mengambil, memanfaatkan, dan membuang wajib mengurus izin ALSE bu [16.21, 10/4/2026] Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan: Bersamaan saja PKKPRL nya bu Utk kegiatan utama nya apa bu? Apakah titik outfall diatas KKPRL kegiatan utama?	Selesai	04/10/2026	

6		WhatsApp	04/13/2026	Permintaan Informasi	[12.47, 13/4/2026] +62 851-1715-9753: Saya kan sedang mengajukan izin usaha bu (penambahan KBLI di NIB), syarat dasarnya KKPRL (sdh -terbit) tp pada saat upload tidak terbaca di sistem [12.47, 13/4/2026] +62 851-1715-9753: Jadi yang perlu saya ajukan ulang permohonan izin usahanya atau membuat KKPRL baru bu? [12.48, 13/4/2026] +62 851-1715-9753: Apakah bisa nanti KKPRLnya terbit lagi tanpa perubahan sedangkan KKPRLnya saat ini masih berlaku bu?	-			[14.10, 13/4/2026] Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan: Sy coba konfirmasi ke perizinan Berusaha jasa bahari Ini KKPRL nya atau Perizinan Berusaha nya bu? [Karena ini 2 hal yang berbeda.	Selesai		
7		WhatsApp	04/15/2026	Permintaan Informasi	[14.46, 15/4/2026] +62 813-1548-4070: Izin tanya Bapak/ibu.. [14.46, 15/4/2026] +62 813-1548-4070: Terkait reklamasi.. [14.47, 15/4/2026] +62 813-1548-4070: Untuk pengajuan reklamasi untuk teminal khusus boleh di share check list dokumen apa saja yg diperlukan?	-			mhn izin bapak/ Ibu, untuk hotline Jasa Bahari bisa ke nomor +62 822-2778-4500	Selesai	04/15/2026	
8		WhatsApp	15 April 2025	Permintaan Informasi	Selamat sore, saya Marwa dari PT Smelting. Kami ingin menanyakan mengenai proses pengajuan perizinan ALSE. Saat ini kami sedang melakukan pengajuan melalui OSS dan menerima feedback terkait verifikasi dokumen permohonan tersebut. Kami ingin memastikan terkait pembayaran PNBPN. Berdasarkan FAQ di website KKP untuk pembayaran PNBPN dilakukan setelah verifikasi administrasi dan teknis, namun di hasil verifikasi kami perlu melampirkan bukti pembayaran tersebut. Terkait hal tersebut, apakah ada langkah yang mungkin terlewat dari pihak kami? Mohon arahan, terima kasih.	PT Smelting			Baik. Utk pembayaran PNBPN ini. Mhn lampirkan pembayaran PNBPN KKPRL saja ya bu	Selesai	15 April 2026	
9		WhatsApp	16 April 2026	Permintaan Informasi	selamat siang, saya roshi admin tambak pt joncin mau pengajuaun izin ALSE apa bisa di bantu alurnya seperti apa dan kemnanya?	PT Joncin			Utk kelengkapan dokumen ada di Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 10 tahun 20	Selesai	16 April 2026	
10		WhatsApp	16 April 2026	Permintaan Informasi	Selamat siang Bapak/Ibu. Perkenalkan saya Despri dari Balai PK Pontianak. Mohon izin Pak/Bu saat ini kami di UPT Pontianak sedang melakukan inventarisasi data pelaku usaha di wilayah kerja kami, kebetulan data pelaku usaha yg belum kami miliki punya ada dari pelaku usaha lingkup SDK khususnya untuk PB ALSE. Terkait hal tersebut apakah kami dapat diinformasikan terkait pelaku usaha yg sudah terbit perizinan berusahnya? adapun surat terkait permohonan data kami lampirkan sebagai berikut. Terimakasih	BPK Pontianak			selamat siang, baik bapak. kami juga menerima surat melalui portal.	Selesai	16 April 2026	
11		WhatsApp	17 April 2026	Permintaan Informasi	Kemarin saya mendapat surat ini karena kbli bukan merupakan kelautan Hanya agency pendidikan aja	-			kalau boleh tau kegiatas usaha nya apa pak? apakah kegiatannya adalah pengangkat an benda muatan kapal tenggelam (BMKT) pak? mgkn bisa koordinasi dengan BKPM ya	Selesai	17 April 2026	
12		WhatsApp	19 April 2026	Permintaan Informasi	Pagi pak, maaf mengganggu, aku mau nanya apakah boleh diinfokan nomor ptsa kkp yg aktif? Soalnya aku sdh wa kesini belum dibls dri kemarin sore Mohon konfirmasinya pak Thank you	-			0811-1200-9003 Ini Hotline SIPPAP ya bu/Bapak	Selesai	19 April 2026	

13		WhatsApp	21 April 2026	Permintaan Informasi	Asslamualaikum ijin bpk/ibu. Sy dr PT Langkara maritim jaya ingin menanyakan perihal syarat dan jadwal pengajuan proposal pemanfaatan sedimen..	PT Langkara Maritim			[08.08, 22/4/2026] Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan: Waslm baik pak. Mhn ditunggu. Kami koordinasi dulu dengan tim teknis [08.10, 22/4/2026] +62 823-3307-5333: Baik trima kasih.. kami tunggu infonya pak/bu 🙏 Mhn ijin Bapak untuk surat permohonan pengajuan dan proposal format pdf dapat dikirimkan melalui WA hotline ini dengan syarat pengajuan dapat dilihat pada Lampiran III Kepmen Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 terima kasih Pak	Selesai	21 April 2026	
14		WhatsApp	21 April 2026	Permintaan Informasi	Pagi bapak/ibu, izin update ya, menurut direktorat KKPRL, ada 3 opsi, 1. kawasan industri lepas bagian zona KKPRL 2. buat MOU 3. kawasan industri tambah KBLI 35111 dan 36002 izin pak/bu, kl industrinya sulit melepas zona KKPRLnya, ada solusi lain gak? Kl pake MOU, itu bisa diterima di sini?	PT GDI			selamat pagi ibu. terima kasih. kami sampaikan dulu kepada pimpinan ya araham pimpinan, utk ketiga opsi ada apakah ada surat tertulis nya bu? jika ada. bisa di proses dengan opsi yang ke 2 paralel Ibu bisa membuat surat ke direktorat deregulasi BKPM untuk fasilitasi kendala KKPRL kawasan industri ya	Selesai	21 April 2026	
15		WhatsApp	23 April 2026	Permintaan Informasi	Selamat Sore Hotline SDK , Saya Nurhamdani dari Balai PK Denpasar, Izin Admin Apakah Bisa Kami Mendapatkan Format FORMAT Pengajuan Perizinan ALSE	BPK Denpasar			Sesuai dengan Permen KP 10 Tahun 2021, berikut outlinenya ya pak	Selesai	23 April 2026	
16		WhatsApp	23 Apr 2026	Permintaan Informasi	Selamat sore, salam sejahtera, Kami dari PT. Merakit Indah Karya di Kepulauan Riau, setelah terbitnya Kepmen kp no. 13 tahun 2026 tentang perencanaan lokasi prioritas dan akan ada pendaftaran baru permohonan perizinan pemanfaatan dan pengelolaan sedimentasi laut, Mohon informasi kapan pendaftaran baru tersebut mulai dibuka..? Atas informasi yang akan diberikan kami ucapkan terima kasih. PT. Merakit Indah Karya Mohd. Rizal Idris Direktur	PT. Merakit Indah Karya			Mhn ijin Bapak untuk surat permohonan pengajuan dan proposal format pdf dapat dikirimkan melalui WA hotline ini dan email sedimentasiperizinan@kkp.go.id dengan syarat pengajuan dapat dilihat pada Lampiran III Kepmen Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 terima kasih Pak	Selesai	23 April 2026	
17		WhatsApp	23 Apr 2026	Permintaan Informasi	Assalamu'alaikum wr wb izin untuk format outline permohonan perizinan ALSE untuk desalinasi air laut dijadikan air tawar dan kode KLBI nya berapa. Terimakasih	-			KBLI 36002 ya pak	Selesai	23 April 2026	
18		WhatsApp	24 April 2026	Permintaan Informasi	selamat pagi admin, saya Gita. izin tanya untuk instrumen acuan wajib atau tidaknya ALSE bisa dilihat dimana ya? khususnya yang ketentuan debit 30m3 itu	-			[10.41, 23/4/2026] Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan: Selamat pagi Ibu. Ada di PP 28 tahun 2025 ya bu [10.41, 23/4/2026] Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan: Lampiran 1a	Selesai	24 April 2026	
19		WhatsApp	24 April 2026	Permintaan Informasi	[16.01, 24/4/2026] +62 811-940-403: Izin Bapak/ibu [16.02, 24/4/2026] +62 811-940-403: Kami sudah mengirim dokumen untuk pengajuan pemanfaatan sedimentasi pasir laut [16.02, 24/4/2026] +62 811-940-403: Mau Cari info terkait rekomendasi Menteri Sudah, waktu itu ke pak Dirjen Komara	-			Mhn ijin Bapak untuk surat permohonan pengajuan dan proposal format pdf dapat dikirimkan melalui WA hotline ini dan email sedimentasiperizinan@kkp.go.id dengan syarat pengajuan dapat dilihat pada Lampiran III Kepmen Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 terima kasih Pak mohon pdf nya dapat dikirimkan juga untuk mempermudah dan mempercepat proses verifikasi di kami	Selesai	24 April 2026	

20		WhatsApp	27 April 2026	Permintaan Informasi	[10.15, 27/4/2026] +62 813-5817-0140: Siang bu [10.15, 27/4/2026] +62 813-5817-0140: Uci sri kandi banyuwangi [10.15, 27/4/2026] +62 813-5817-0140: Ditunggu panduannya bu [10.15, 27/4/2026] +62 813-5817-0140: Terima kasih 🙏	Uci Skrikandi			[10.15, 27/4/2026] Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan: baik ibu OSS RBA - Pengajuan Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi _ Tinggi [10.16, 27/4/2026] Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan: coba ini ya bu [10.16, 27/4/2026] Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan: Cara memohon ALSE dr sisi pelaku usaha 1. Cari penambahan KBLI Pendukung 36002 (apabila usaha utamanya bukan air). Pilih yang lingkupnya Pengambilan Air Laut 2. Kemudian nanti diminta pilih lokasi. di lokasi tersebut sudah ada KKPRL kegiatan utama maka kkprl tersebut dapat di pakai untuk 36002. pilih lokasi dan jawab sudah memiliki kkprl 3. Kemudian diminta menjawab apakah sudah ada persetujuan lingkungan? jawab sudah jika persetujuan lingkungan kegiatan utama sudah melingkup pengambilan air laut 4. Kemudian di halaman akhir muncul pemenuhan PB 36002 berupa upload dokumen	Selesai	27 April 2026	
21		WhatsApp	27 April 2026	Permintaan Informasi	Tahun ini kami di Kabupaten Pangandaran menjadi salah satu lokasi KNMP, dengan salah satu unit usahanya pabrik es, rencana pabrik es tersebut memakai air laut sebagai bahan bakunya langsung, yg saya ketahui dengan adanya pemanfaatan air laut tersebut otomatis memerlukan KBLI ALSE, mungkin yg saya tanyakan terkait batasannya pabrik es tersebut harus memiliki KBLI ALSE serta persyaratan yg dibutuhkan, terima kasih	Kabupaten Pangandaran			[08.39, 27/4/2026] Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan: untuk kewenangan pemanfaatan ALSE diatur di PP28 lampiran 1a berikut ya pak [08.39, 27/4/2026] Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan: dicari KBLI 36002 [08.39, 27/4/2026] Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan: jika air laut diambil kecil dari 30m3/ bulan masuk ke kewenangan daerah [08.40, 27/4/2026] Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan: jika besar sama 30m3/ bulan masuk ke kewenangan pusat [08.41, 27/4/2026] Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan: sebelum memohonkan perizinan berusaha pemanfaatan ALSE wajib punya izin dasar berupa: 1. KKPRL kegiatan utama/ KKPRL KBLI 36002 2. Persetujuan Lingkungan [08.41, 27/4/2026] Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan: jika kedua ini sudah dipenuhi, bisa mengajukan permohonan berusaha Izin pemanfaatan ALSE	Selesai	27 April 2026	
22		WhatsApp	27 April 2026	Permintaan Informasi	Selamat siang min Saya Abdul Kadir Dari Lili Farm Mohon informasinya perbaikan apa saja pada dokumen permohonan ALSE mikik LILI FARM	Lili Farm			Sesuai Permen KP 10 Tahun 2021 berikut outlinennya ya pak	Selesai	27 April 2026	
23		WhatsApp	30 April 2026	Permintaan Informasi	Perusahaan kami akan melakukan kegiatan Dumping di Laut dari hasil Dredging Jetty kami yang dilakukan oleh Pihak Ketiga. Kami dapat info bahwa kegiatan Dumping tersebut memerlukan PKKPRL. Setelah kami cek di OSS, untuk kegiatan Dumping hanya tersedia di menu PB-UMKU. Kami ingin konfirmasi apakah benar PKKPRL akan didapatkan setelah mendapatkan PB-UMKU terlebih dahulu, atau bagaimana ya seharusnya pak/bu?	PT MCCI			untuk KKPRL lgsg ke hotline KKPRL ya pak	Selesai	30 April 2026	
24		WhatsApp	30 April 2026	Permintaan Informasi	Selamat sore pak...saya Andy Humas SDB Tambak Udang. Mohon info utk pembuatan AISE	SDB Tambak			[17.29, 30/4/2026] Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan: utk pemenuhan ALSE wajib memiliki izin dasar berupa : 1. PKKPRL KBLI kegiatan utama (tambak) dengan sayarat titik intake dan outfall pengambilan air lautnya berada pada kegitanya utama) 2. persetujuan lingkungan [17.29, 30/4/2026] Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan: setelah keduanya dipenuhi, boleh melakukan pemenuhan izin berusaha pemanfaatan ALSE [17.30, 30/4/2026] Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan: berikut tatacara pengajuannya di Web OSS	Selesai	30 April 2026	

25		WA Holine Perizinan Jasa Bahari	13 April 2026	Permintaan Informasi	Mau nanya Nomor permohonan: I-20260410214834866189 8 atas nama PT Millennium Permata Indah nanya update mereka, karena mereka sudah 2 kali permohonan di OSS, update nya seperti apa?	Hotline Perizinan Dit Sumber Daya Kelautan KKP			Petugas memberikan jawaban sebagai berikut: Setelah aku cek di pelacakan OSS, PT Millennium Permata Indah permasalahannya PKKPRL gak kebaca terbit di OSS. Maka dari itu kayaknya gak bisa lanjutkan ke Perizinan Berusaha (Sertifikat Standar) maupun PB UMKU Izin Wisata Bahari.	Selesai	13 April 2026	
26		WA Holine Perizinan Jasa Bahari	15 April 2026	Permintaan Informasi	Izin mau tanya terkait check list permohonan reklamasi untuk terminal khusus	PT Bumitama			Petugas memberikan jawaban sebagai berikut: Mohon dicek terlebih dahulu kewenangan perizinan reklamasi untuk terminal khusus sesuai dengan zona ruang lautnya pada dokumen Rencana Zonasi atau Rencana Tata Ruang. Jika berada di zona pelabuhan laut DLkr/DLkp, menjadi kewenangan dari Perhubungan	Selesai	15 April 2026	
27		WA Holine Perizinan Jasa Bahari	15 April 2026	Permintaan Informasi	Mau tanya terkait dokumen studi kelayakan itu seperti apa dan apa yg harus disajikan di dalamnya	Andriyani Lestari			Petugas memberikan jawaban sebagai berikut: Terkait dengan substansi dokumen studi kelayakan untuk pengajuan Izin Pelaksanaan Reklamasi, mohon menyesuaikan poin per poin sesuai dengan penjelasan yang telah dikirimkan melalui hotline.	Selesai	15 April 2026	
28		WA Holine Perizinan Jasa Bahari	17 April 2026	Permintaan Informasi	Untuk pengajuan melalui oss apakah ada link yg membantu. Untuk izin permohonan pelaksanaan reklamasi	Andriyani Lestari			Petugas memberikan jawaban sebagai berikut: Setelah aku cek di pelacakan OSS, PT Millennium Permata Indah permasalahannya PKKPRL gak kebaca terbit di OSS. Maka dari itu kayaknya gak bisa lanjutkan ke Perizinan Berusaha (Sertifikat Standar) maupun PB UMKU Izin Wisata Bahari.	Selesai	17 April 2026	
29		WA Holine Perizinan Jasa Bahari	18 April 2026	Permintaan Informasi	Mohon dibantu untuk alur verifikasi tersebut pak/bu untuk sistem OSS RBA karena sejak februari belum ada verifikasi, kami membutuhkan verifikasi untuk kelengkapan data lanjutan. Terimakasih	PT Saumy Gemilang Indonesia			Petugas memberikan jawaban sebagai berikut: Setelah aku cek di pelacakan OSS, PT Millennium Permata Indah permasalahannya PKKPRL gak kebaca terbit di OSS. Maka dari itu kayaknya gak bisa lanjutkan ke Perizinan Berusaha (Sertifikat Standar) maupun PB UMKU Izin Wisata Bahari.	Selesai	18 April 2026	
30		WA Holine Perizinan Jasa Bahari	22 April 2026	Permintaan Informasi	Kami sedang melaksanakan rencana kegiatan wisata bahari oleh perusahaan Daerah kami hanya kami blum tau syaratnya.. ini sementara berproses KKPRL dan izin berusaha yg nanti masuknya ke wisata tirta yg diinfo akan ada PB UMKUH untuk Wisata bahari.. oleh karena itu kami mohon arahannya l.. Terima kasih	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT			Terkait dengan permohonan PB UMKU Izin Wisata Bahari oleh pelaku usaha, silakan menyusun proposal sesuai dengan persyaratan dalam Permen KP 10/2021. Adapun daftar KBLI yang dapat mengajukan PB UMKU Izin Wisata Bahari adalah 93246 Aktivitas Wisata Air; 93249 Wisata Tirta Lainnya; 93242 Wisata Selam; 93243 Dermaga Marina; dan 93245 Wisata Memancing.	Selesai	22 April 2026	

FORMAT REKAPITULASI PENANGANAN PENGADUAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
PERIODE BULAN MEI 2026

No	ID Tracking	Sumber Pengaduan	Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Data Pengadu	Penanganan		Tindaklanjut		Tanggal Tindaklanjut	Keterangan
							Verifikator	Penelaah	Uraian	Status		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
1		WhatsApp	4-May-2026	Permintaan Informasi	Mohon dibantu untuk alur verifikasi tersebut pak/bu untuk sistem OSS RBA karena sejak februari belum ada verifikasi, kami membutuhkan verifikasi untuk kelengkapan data lanjutan. Terimakasih	PT SAUMY GEMILANG INDONESIA			[10.34, 4/5/2026] Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan: selamat pagi pak, sepertinya ini masuk ke panel PTSP pekanbaru pak. tidak di Direktorat Sumber Daya Kelautan. pak, ini KBLI brp? ini apakah izin pengangkatan benda muatan tanggal tenggelam? dan kenapa masuknya ke PTSP ya? [11.27, 4/5/2026] Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan: pak, saran kami, bersurat ke PTSP Pekanbaru, sampaikan kronologi kesulitannya ya. atau bisa lgsg datang ke PTSP pekanbaru. nanti mereka yang akan mengambil keputusan seperti apa	Selesai	4-May-2026	
2		WhatsApp	5-May-2026	Permintaan Informasi	[13.56, 5/5/2026] +62 812-5580-8167: Selamat siang Pak/Ibu admin izin perkenalkan saya Marianus Filipe tim teknis perizinan PLTU Ropa (PLN Unit Induk Wilayah NTT). Berkenan kami mohon waktu untuk menanyakan persyaratan perizinan ALSE yang sedang kami proses Saat ini kami sudah memiliki izin PKKPRL yang terbit dengan nomor izin 02032610515300015 yang terbit tanggal 02 Maret 2026, dalam izin ini sudah mengakomodir izin PKKPRL dan ALSE, tetapi kami diinfokan tim evaluator perizinan kkpri bahwa utk izin usaha perlu melengkapi persyaratan dokumen lainnya. Berkenan mohon info dan petunjuknya pak/ibu terima kasih	PT. Seabed Mineral Indonesia			[14.25, 5/5/2026] Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan: baik pak. selamat siang. izin menjelaskan ya pak. utk pemenuhan ALSE wajib memiliki izin dasar berupa : 1. PKKPRL KBLI kegiatan utama (ketenagalistrikan) dengan sayarat titik intake dan outfall pengambilan air lautnya berada pada kegitana utama) 2. persetujuan lingkungan setelah keduanya dipenuhi, boleh melakukan pemenuhan izin berusaha pemanfaatan ALSE	Selesai	12-May-2026	
3		WhatsApp	8-May-2026	Permintaan Informasi	Asistensi terkait Kelengkapan dokumen secara rinci (Permenkp 10/2021)	PT Unggul Indah Cahaya			Asistensi terkait Kelengkapan dokumen secara rinci (Permenkp 10/2021) 1. Menyesuaikan dokumen kelayakan teknis 2. Menyesuaikan Peta Lokasi letak geografis 3. Melampirkan surat rekomendasi dinas terkait kesesuaian ruang darat 4. Melampirkan Biaya operasional untuk pemanfaatan air laut selain non energi 5. Menyesuaikan debit air yang digunakan	Selesai	8-May-2026	
4		WhatsApp	8-May-2026	Permintaan Informasi	Siang saya mau bertanya terkait pengemabilan permohonan sertifikat sstandar saya. terkait ini apakah dari sisi pengajuan saya ada yagn salah. Apakah ada format tertentu untuk penyelesaian ini Untuk ini knapa di kembalikan ya	-			[13.14, 8/5/2026] Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan: Utk permohonan bapak, pengambilan air sumur adalah KemenPUPR pak Bukan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ruang lingkup ketika mengajukan permohonan pilih yg air permukaan ya pak Jika utk air permukaan pilih ruang lingkup nya yang ini pak "Kelompok ini mencakup usaha pengadaan dan penyaluran air baku....."	Selesai	8-May-2026	
5		WhatsApp	8-May-2026	Permintaan Informasi	[15.16, 6/5/2026] +62 878-7336-0063: Menindaklanjuti surat pemberitahuan tsb, kami sudah memperbaiki syarat tsb di sistem OSS [15.16, 6/5/2026] +62 878-7336-0063: Mohon untuk di cek [15.17, 6/5/2026] +62 878-7336-0063: terimakasih [07.59, 8/5/2026] +62 878-7336-0063: Pemenuhan Persyaratan sudah di submit kembali [08.00, 8/5/2026] +62 878-7336-0063: mohon untuk di cek ya pak	PT Krakatau Chandra Energi			Baik Bapak. Terima kasih	Selesai	8-May-2026	

6		WhatsApp	11-May-2026	Permintaan Informasi	[12.56, 11/5/2026] +62 858-6617-9434: Selamat siang bapak/ibu verifikator perizinan KKP [12.58, 11/5/2026] +62 858-6617-9434: Perkenalkan, kami dari PT. Seabed Mineral Indonesia. Kami mendapat rekomendasi ke nomor hotline ini terkait pengajuan Proposal usaha sedimentasi laut dari rekanan kami [13.02, 11/5/2026] +62 858-6617-9434: Mohon arahan bapak/ ibu, ke alamat email mana kami harus mengupload proposal usaha sedimentasi laut di area blok prioritas sedimentasi terbaru sesuai dengan kepmen No. 13 KKP Tahun 2026. [13.02, 11/5/2026] +62 858-6617-9434: Atas arahan bapak/ibu, kami ucapkan terimakasih 🙏	PT. Seabed Mineral Indonesia			[13.58, 11/5/2026] Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan: selamat siang pak [13.59, 11/5/2026] Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan: Mhn ijin Bapak untuk surat permohonan pengajuan dan proposal format pdf dapat dikirimkan melalui WA hotline ini dan email sedimentasiperizinan@kkp.go.id dengan syarat pengajuan dapat dilihat pada Lampiran III Kepmen Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 terima kasih Pak	Selesai	11-May-2026	
7		WhatsApp	12-May-2026	Permintaan Informasi	Izin bertanya jika peruntukan alse kami non komersil sepenuhnya utk pembangkitan listrik pltu kami gak perlu lengkapi aspek komersilnya ya pak? Izin petunjuk [11.54, 12/5/2026] +62 812-5580-8167: Dan nanti apakah akan ada verlap dari kkp jakarta pak?	PLTU Ropa (PLN Unit Induk Wilayah NTT)			[12.51, 12/5/2026] Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan: iyaa non Komersial KBLI 36002 Dan nanti apakah akan ada verlap dari kkp jakarta pak? ada pak. nanti setelah verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan. Siap terima kasih infonya Pak/Bu petunjuknya 🙏👉👉 aspek komersial nanti sub bab nya tetap ditulis yaa pak. namun dibuatkan narasi kegiatan ini dimanfaatkan unutm kebutuhan domestik saja	Selesai	12-May-2026	
8		WhatsApp	13-May-2026	Permintaan Informasi	Bapak Ir. A. Koswara, M.P. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Dengan hormat, Bersama email ini kami sampaikan hasil perbaikan dokumen Rencana Kerja Tetap ("RKT") PT Rejeki Abadi Lestari berdasarkan hasil verifikasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ("KKP") sebagaimana tercantum dalam Surat No. B.932/DJPK.6/TU.210/IV/2026 tanggal 20 April 2026 tentang Hasil Verifikasi Permohonan Izin Pemanfaatan Pasir Laut PT Rejeki Abadi Lestari. Kami sangat mengharapkan kiranya dokumen RKT yang kami sampaikan dapat diproses lebih lanjut oleh tim KKP, dan kami juga menunggu arahan selanjutnya dari pihak KKP terkait langkah-langkah lainnya yang diperlukan agar RKT PT RAL dapat diterima dan IPPL PT Rejeki ... [07.16, 13/5/2026] Abrar PT RAL: Selamat pagi bapak/ibu Terkait dengan revisi RKT PT RAL kami sampaikan seperti pesan sebelumnya ya dan kami sudah mengirimkan email juga seperti arahan sebelumnya	RAL			Baik Bapak. Terima kasih	Selesai	13-May-2026	
9		WhatsApp	13-May-2026	Permintaan Informasi	[14.43, 13/5/2026] +62 822-8960-7031: Selamat sore [14.44, 13/5/2026] +62 822-8960-7031: Perkenalkan saya deni dari tambak perorangan an Zaydan DP. Mau tanya terkait izin alse, untuk pengajuan kemana ya Bu / Pak? Apakah ada guideline atau panduannya Bu/Pak?	perorangan an Zaydan DP			untuk formatnya bisa merujuk ke Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 10 Tahun 2021	Selesai	13-May-2026	
10		WhatsApp	13-May-2026	Permintaan Informasi	[13.52, 13/5/2026] +62 812-8317-789: Assalam wr wb...mhon ijin utk sediment laut bisa tnya pa? [13.53, 13/5/2026] +62 812-8317-789: By wa or boleh phone? Mhon ijin info : utk perijinan export terkait sedimen laut apa sudah ada pa?	-			Belum ada pak. Masih moratorium	Selesai	13-May-2026	

11		WhatsApp	18-May-2026	Permintaan Informasi	[11.45, 18/5/2026] +62 822-2828-2144: Selamat siang, perkenalkan saya Kautsar dari Dirgantara Legal Confidant ingin menanyakan terkait proses perizinan pemanfaatan hasil sedimentasi laut berupa pasir laut, kami melakukan ini untuk proses LDD yang diperuntukkan untuk akuisisi perusahaan yang bergerak di bidang tersebut [12.03, 18/5/2026] +62 822-2828-2144: Pertanyaan yang ingin kami tanyakan adalah: 1. Perusahaan target sudah memiliki PKKPRL dan rekomendasi lokasi yang telah habis masa berlakunya, apakah dapat kami melanjutkan untuk proses IPPL dengan kondisi dokumen rekomendasi lokasi yang telah habis? Apabila memang bisa melanjutkan bagaimana tahapan tata cara untuk melakukan pengurusan IPPL apabila sudah mendapatkan PKKPRL? 2. Apabila ingin melakukan ekspor pasir laut syarat2 apa saja yang perlu dilampirkan?, dan apakah perusahaan yang melakukan Pengambilan Pasir Laut dapat dilakukan oleh perusahaan yang sama atau harus berbeda perusahaan untuk melakukan keduanya tersebut?	Dirgantara Legal Confidant			[12.48, 18/5/2026] Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan: baik terima kasih sudah menghubungi Hotline Sumber Daya Kelautan [12.50, 18/5/2026] Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan: izin menjelaskan Bapak: 1. Jika sudah mempunyai KKPRL bisa lanjut ke Persetujuan Lingkungan, kemudian dilanjutkan dengan RKT 2. untuk ekspor laut masih moratorium ya pak. semua kegiatan harus 1 entitas yang sama. KKPRL, persetujuan lingkungan, dan IPPL	Selesai	18 May 2026	
12		WhatsApp	18-May-2026	Permintaan Informasi	Sore bapak/ibu, tadi kami sempat rapat sama pak Dendy, direktur BKPM Deregulasi, beliau usul dua opsi: 1) tenant kerja sama kawasan industri dan pake KKPRL yg milik kawasan industri; 2) tenant cari tempat di luar KKPRL yg milik kawasan industri dan urus KKPRP baru. Kami ingin pake opsi pertama - kerja sama ya.	PT GDI (PLTU di Buli, Halmim)			[16.16, 18/5/2026] Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan: Baik ibu. Boleh nanti BKPM minta surat tertulisnya ya bu.. nanti biar kuat argumennya [16.17, 18/5/2026] Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan: Sementara kami sampaikan kepada pimpinan	Selesai	18 May 2026	
13		WhatsApp	19 May 2026	Permintaan Informasi	[10.20, 19/5/2026] +62 822-9806-1041: Siap, izin melaporkan jadi kendala yang dihadapi PT SGPJB adalah kami seperti mengurus PKKPRL dari awal Pak/Bu. Seharusnya kalau terkait ALSE yang kami ketahui kan bisa langsung ya Pak/Bu. Kami mempunyai evidence rekaman dan screenshot nya juga Bapak/Ibu yang menunjukkan kendala pengurusan di sistem [10.20, 19/5/2026] +62 822-9806-1041: Untuk video, bisa saya kirimkan via email kah Bapak/Ibu?	PT SGPJB			[10.20, 19/5/2026] Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan: bisa dikirimkan kesini saja ya [10.21, 19/5/2026] Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan: nanti kami sampaikan ke pimpinan	Selesai	19 May 2026	
14		WhatsApp	19 May 2026	Permintaan Informasi	Sya agung dri PT Koyo Segoro Endah budidaya tambak udang kab. Tulungagung, dapat nomor ini dari pak wais PSDKP Trenggalek, terkait kmrin kmi ada kekurangan ALSE dan ini sudah kami penuhi dg KBLI 36002 sesuai petunjuk.. apakah jika sudah terbit sbgai Impiran NIB brti kami sudah clear ya bapak ibu ?	PT Koyo Segoro Endah			[11.36, 20/5/2026] Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan: selamat siang pak maaf kami baru membalas. sebelumnya. apakah bapak sudah mempunyai KKPRL dan persetujuan lingkungan kegiatan tambak udang? jika keduanya sudah ada. bapak bisa melakukan permohonan di OSS untuk izin pemanfaatan ALSE. syarat dokumen pemenuhannya ada di Permen Kelautan dan perikanan nomor 10 Tahun 2021	Selesai	19 May 2026	
15		WhatsApp	20 May 2026	Permintaan Informasi	Selamat pagi Bapak/Ibu. Mohon bantuan update pada sistem tersebut. Dimana kami sudah membayar PNBPN ALSE namun sistem belum terupdate telah membayar. Mohon bantuannya Bapak/Ibu. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 🙏	PT Agro Makmur Raya			Selamat pagi. Baik pak. Akan segera kami update	Selesai	21 May 2026	
16		WhatsApp	22 May 2026	Permintaan Informasi	[14.02, 22/5/2026] +62 812-5906-5351: selamat siang kak.. izin menyampaikan bahwa kami telah mengirim surat permohonan asistensi ALSE melalui email berikut surat permohonan kami	PT Pupuk Kaltim			baik bu. akan kami sampaikan kepada pimpinan, terima kasih	Selesai	22 May 2026	

17		WhatsApp	26 May 2026	Permintaan Informasi	Assalamualaikum pak/bu, menindaklanjuti undangan verifikasi lapangan pada PT PLN Indonesia Power PLTU Bengkayang tgl 3 Juni 2026. Izin menginfokan insyaAllah kami hadir bersama dengan pak Kepala Balai PK Pontianak, namun karena keterbatasan anggaran kemungkinan besar kami akan PP, dikarenakan jarak Pontianak - Bengkayang masih memungkinkan untuk PP. Terimakasih Berikut pak untuk listnya Syarif Iwan Taruna Alkadrie M.Si Hanizam S.St.Pi Hendrikus Luat Maring S.P. Despriyanto Supriadi S.Pi. Temmy Rahim	Balai PK Pontianak		[11.40, 26/5/2026] Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan: waslm. terima kasih informasinya pak. boleh info nama2nya ya pak [11.50, 26/5/2026] Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan: izin info ya pak. ini pembiayaan masing2 ya pak	Selesai	26 May 2026	
18		WA Hotline Perizinan Jasa Bahari	5 Mei 2026	Permintaan Informasi	Kami sementara ajukan izin Reklamasi atas nama PT. Multi Mina Persada... Mohon info lanjutan	PT. Multi Mina Persada		Pertugas memberikan jawaban sebagai berikut: Baik, saat ini dokumen permohonan tersebut sedang kami verifikasi. Untuk informasi awal, PT Multi Mina Persada akan kami undang dalam coaching clinic perizinan berusaha yang akan dilaksanakan mendatang. Terima kasih	Selesai	5 Mei 2026	
19		WA Hotline Perizinan Jasa Bahari	6 Mei 2026	Permintaan Informasi	kita mau konsultasi terkait dengan perubahan nama perusahaan atas lokasi KKPRL yg sdh terbit izinnnya atas nama PT. Multi Mina Persada ke perusahaan lain apakah perlu pengajuan KKPRL ulang juga atau gimana...trm kasih	PT. Multi Mina Persada		Pertugas memberikan jawaban sebagai berikut: Sebagai informasi, kontak hotline ini untuk perizinan reklamasi dan wisata bahari, serta persetujuan memancing. Terkait PKKPRL silakan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut pada kontak hotline berikut +62 877-6225-0001. Terima kasih	Selesai	6 Mei 2026	
20		WA Hotline Perizinan Jasa Bahari	6 Mei 2026	Permintaan Informasi	mau konsultasi min, ini beberapa pelaku usaha di kaltim terkendala di pengajuan izin usaha di oss min, ketika mengisi persyaratan pada pengajuan izin usaha, kolom pengisiannya terkunci min, jadi tidak bisa dilakukan tahap berikutnya... mohon arahannya min karna banyak pelaku usaha di kami ndak bisa lanjut ke izin usaha	LPRL Serang - Satpel Balikpapan		Pertugas memberikan jawaban sebagai berikut: Jika dilihat dari tampilan video yang dikirimkan, sepertinya sudah pernah diisi data usaha sehingga muncul lanjutan izin usahanya walalupun NIB belum terbit. Apakah sudah mencoba klik button orange "Belum melengkapi persyaratan"?	Selesai		

21		WA Hotline Perizinan Jasa Bahari	7 Mei 2026	Permintaan Informasi	Mohon di bantu verifikasi atas permohonan izin reklamsi dari PT Multi Mina pesada pak. Mengingat sudah 1 bulan status masih proses verifikasi	PT. Multi Mina Persada			Pertugas memberikan jawaban sebagai berikut: Berdasarkan hasil pengecekan dokumen, untuk permohonan ke-2 Izin Pelaksanaan Reklamsi atas nama PT Multi Mina Persada masih perlu perbaikan. Surat hasil verifikasi masih menunggu tanda tangan pimpinan. Oleh karena itu, insya allah hari Senin tanggal 11 Mei 2026 kami akan mengundang PT Multi Mina Persada untuk coaching clinic terkait pengajuan izin tersebut melalui zoom. Surat undangan resmi menyusul kami akan sampaikan.	Selesai	7 Mei 2026	
22		WA Hotline Perizinan Jasa Bahari	19 Mei 2026	Permintaan Informasi	kalau reklamsi peruntukan untuk pemukiman dan non berusaha, itu bagaimana ya mengurusnya? apa lewat OSS juga? perorangan untuk pemukiman	LPRL Sorong			Pertugas memberikan jawaban sebagai berikut: Untuk perorangan harus lihat skala usahanya. Biasanya jika perorangan dan non berusaha diajukan ke Pemerintah Daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP daerah. OSS hanya untuk kegiatan berusaha dan basisnya KBLI	Selesai	19 Mei 2026	
23		WA Hotline Perizinan Jasa Bahari	21 Mei 2026	Permintaan Informasi	Izin pak, kami sudah ajukan permohonan tambahan pkkpri Mohon di bantu verifikasi ya pak. Terimakasih	PT. Multi Mina Persada			Pertugas memberikan jawaban sebagai berikut: Terkait PKKPRL silakan koordinasi lebih lanjut dengan Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui hotline berikut	Selesai	21 Mei 2026	
24		WA Hotline Perizinan Jasa Bahari	22 Mei 2026	Permintaan Informasi	Mau konsultasi pengajuan izin reklamsi yang diajukan via OSS apakah untuk perizinannya via pusat atau daerah ya?? Untuk ketahuannya kami sudah memiliki PKKPRL an. PT Amirtha Mustika Sari yg area izin lokasi berada pada perairan laut banda. Dan telah menerima surat hasil verifikasi oleh dir Jasa Bahari dan diarahkan untuk perbaikan. Mohon arahan dan petunjuknya Bapak/ibu. Terimakasih banyak sebelumnya.	PT Amirtha Mustika Sari			Pertugas memberikan jawaban sebagai berikut: Terkait kewenangan penerbitan perizinan pelaksanaan reklamsi apakah di pusat atau daerah disesuaikan dengan skala usaha dan lokasi usaha pemrakarsa sebagaimana gambar berikut. Dikarenakan data yang kami terima dari OSS bahwa PT Amirtha Mustika Sari skala usaha menengah, maka penerbitan Izin Pelaksanaan Reklamsi dari Pusat	Selesai	22 Mei 2026	

FORMAT REKAPITULASI PENANGANAN PENGADUAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
PERIODE BULAN JUNI 2026

No	ID Tracking	Sumber Pengaduan	Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Data Pengadu	Penanganan		Tindaklanjut		Tanggal Tindaklanjut	Keterangan
							Verifikator	Penelaah	Uraian	Status		
1		Whatsapp	10 Juni 2026	Permintaan Informasi	Mohon informasi status permohonan izin wisata bahari sejak bulan Maret 2026 submit ke OSS namun tidak ada perubahan	PT. Komodo Menjaga Resort	Admin Hotline	PIC Perizinan	Pertugas memberikan jawaban sebagai berikut: Mohon disampaikan Nama Perusahaan, NIB, KBLI, dan Nomor Kegiatan Usaha (NKU) pengajuan izin tersebut. Kami akan sampaikan kepada BKPM karena permohonan tersebut tidak ada di akun kami. Sebagai informasi banyak kasus serupa pengajuan PB UMKU Wisata Bahari yang terkendala di sistem OSS, terutama pengajuan di awal tahun 2026. Terkait kendala perizinan di OSS tersebut, akan kami sampaikan kepada pihak BKPM untuk ditindaklanjuti. Apabila sudah ada info dari mereka, kami akan sampaikan kepada Saudara kembali.	Selesai	10 Juni 2026	
2		Whatsapp	11 Juni 2026	Permintaan Informasi	-	PT. Multi Mina Persada	Admin Hotline	PIC Perizinan	Penyampaian informasi untuk verifikasi dokumen permohonan Izin Pelaksanaan Reklamasi Hasil Pengawasan melalui zoom meeting	Selesai	11 Juni 2026	
3		Whatsapp	23 Juni 2026	Permintaan Informasi	Selamat siang ijin konsultasi Perkenalkan saya Tulus Widiyanto dari PT Unichem Candi Indonesia Tuban Jawa Timur, bergerak di industri garam, kami ada rencana pengembangan usaha pembuatan garam dengan sistem desalinasi di Bogorejo Tuban Jawa Timur. ijin menyampaikan kami ada agenda terkait pemanfaatan wilayah laut dengan melakukan reklamasi untuk instalasi pengambilan air laut sebagai bahan baku industri garam. kami lampirkan rencana dan poligon kami di Bogorejo, Bancar Kabupaten Tuban Jawa Timur. Kami belum pengajuan PKKPR, kuatir nanti harus mengulang. JT belum ada. Posisi lahan terakhir kami tambak yang sudah lama kosong. KBLI yang akan dimasukan adalah 08930, 36001, dan 36002.	Dimas	Admin Hotline	PIC Perizinan	Petugas memberikan jawaban sebagai berikut: Jika demikian belum ada sama sekali PKKPR yang dimiliki ya. Untuk kegiatan usaha yang perlu diurus perusahaan termasuk multi perizinan di kami dan lintas unit kerja. Identifikasi sementara, perizinan yang perlu diurus adalah sebagai berikut: 1. Izin dasar PKKPR 2. Perizinan Berusaha Izin Pemanfaatan Air Laut selain energi 3. PB UMKU Izin Pelaksanaan Reklamasi Saran kami, silakan perusahaan bersurat secara resmi yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, tembusan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut. Karena per masing-masing izin perlu asistensi/konsultasi tersendiri. Surat bisa dikirimkan melalui hotline ini, nanti kami bantu sampaikan kepada pimpinan yang bersangkutan.	Selesai	23 Juni 2026	
4		Whatsapp	2 Juni 2026	Permintaan Informasi	[13.57, 2/6/2026] Anwar PT Phoenix Resources Internasional: Selamat siang Mau tanya. Yg mencakup ALSE itu apa saja yaa [14.19, 2/6/2026] Anwar PT Phoenix Resources Internasional: ang termasuk dalam ALSE apakah hanya pengambilan air laut menjadi air tawar aja Atau ada giat lain yang termasuk dalam alse Bilamana kegiatan cooling sistem pada boiler itu juga termasuk ALSE yaa	PT Phoenix Resources Internasional			Proses apapun yang mengambil/ memanfaatkan air laut itu ALSE ya pak. Betul pak. Termasuk ALSE	Selesai	2 Juni 2026	
5		Whatsapp	3 Juni 2026	Permintaan Informasi	[09.41, 3/6/2026] +62 823-3941-8883: Selamat pagi, Dengan id izin I- 202603031240022917581 Mau meminta informasi ini berkas ini di cek dmn	PT.Komodo menjaga resort			Mhn izin pak. Ini ada di direktorat Jasa Bahari	Selesai	3 Juni 2026	
6		Whatsapp	8 Juni 2026	Permintaan Informasi	pagi pak, saya abdi dari balai pk pontianak wilker tarakan mau tanya pak terkait perizinan berusaha pemanfaatan ALSE a.n PT. Phoeni Resource International di Tarakan apakah sudah pernah ada mengajukan permohonan ya?	Balai Pengelolaan Kelautan pontianak			[08.36, 8/6/2026] Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan: Selamat pagi pak [08.37, 8/6/2026] Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan: Utk Phoenix sudah pernah mengajukan permohonan, sudah asistensi, sdg proses pemenuhan dokumen permohonan	Selesai	8 Juni 2026	

7		Whatsapp	8 Juni 2026	Permintaan Informasi	Selamat pagi pak..saya mau masukkan proposal sedimentasi..mohon arahan	-			Mhn ijin Bapak untuk surat permohonan pengajuan dan proposal format pdf dapat dikirimkan melalui WA hotline ini dan email sedimentasiperizinan@kkp.go.id dengan syarat pengajuan dapat dilihat pada Lampiran III Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 terima kasih Pak	Selesai	8 Juni 2026	
8		Whatsapp	9 Juni 2026	Permintaan Informasi	Selamat pagi admin, kami dri PT LBE Banten ingin mengajukan permohonan izin ALSE. Bolehkah kami minta panduan tata cara untuk mengupload dokumen di OSS? Terima kasih	PT LBE			berikut panduan untuk risiko Menengah sampai Tinggi ya pak	Selesai	9 Juni 2026	
9		Whatsapp	10 Juni 2026	Permintaan Informasi	[13.11, 5/6/2026] +62 857-5915-1137: pusing sya masuk 36002 malah di wa direktorat tata ruang [13.11, 5/6/2026] +62 857-5915-1137: Permisi selamat sore, sebelumnya perkenalkan saya dari tim kerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan permohonan yang masuk pada tanggal 26 Mei 2026, PT. Joncin Agromina Sejahtera telah mengajukan permohonan dengan KBLI Penampungan dan Penyaluran Air Baku (36002), sedangkan PT. Joncin Agromina Sejahtera juga telah memiliki KKPRL yang masih berlaku dengan nomor KBLI yang sama. Oleh karena itu, saya izin bertanya pak terkait maksud dari pengajuan yang telah dilakukan tersebut adalah berupa penambahan nomor KBLI atau permohonan penerbitan KKPRL baru? Terimakasih pak sebelumnya.	PT Jonchin Agromina Sejahtera			[13.12, 5/6/2026] Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan: siaap berarti kendala OSS ya pak. banyak juga yang seperti ini. kami rencana mau zoom dengan BKPM hari selasa jam 13.30. membahas kendala ini. karena banyak yang masuk ke KKPRL kembali	Selesai	10 Juni 2026	
10		Whatsapp	10 Juni 2026	Permintaan Informasi	Hallo, selamat pagi, kami dari PT Budidaya Biru Berkelanjutan mohon izin untuk menanyakan persyaratan ALSE apakah masuk KBLI atau UMKU? terima kasih [09.41, 10/6/2026] +62 878-4670-0034: baik, terima kasih [09.46, 10/6/2026] +62 878-4670-0034: terkait dengan penilaian teknis ALSE, apakah tetap akan dilakukan sementara kmi sudah memiliki KKPRL?	PT Budidaya Biru Berkelanjutan			Masuk perizinan berusaha ya bu, bukan Umku Izin Pemanfaatan ALSE pada Pelayanan Berusaha Direktorat Sumber Daya Kelautan Syarat permohonan izin berusaha pemanfaatan ALSE adalah sudah adanya persyaratan dasar berikut: 1. Izin PKKPRL 2. Persetujuan lingkungan Dokumen permohonan merujuk pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 mengenai Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	Selesai	10 Juni 2026	
11		Whatsapp	10 Juni 2026	Permintaan Informasi	Selamat siang kak.. Izin kami menunggu arahan, karena asistensi terakhir di waktu lalu kami diminta bersurat ke BKPM Izin kak... Apakah hal di atas merupakan solusi atas permasalahan kami, sehingga kami diminta mengulang dengan melakukan penambahan kegiatan/KBLI lagi, namun KKPRLnya menggunakan mekanisme validasi?	PT Pupuk Kaltim Timur			Iya pak. Hanya penambahan KBLI pak. Tidak ada penilaian teknis dll. Hanya validasi saja	Selesai	10 Juni 2026	

12		Whatsapp	10 Juni 2026	Permintaan Informasi	[10.00, 12/6/2026] Marwa Efira K. PT Smelting: Selamat pagi juga pak/bu 🙏 [10.01, 12/6/2026] Marwa Efira K. PT Smelting: Berikut Pak/Bu: Nama: Moch. Imam Muchsony Jabatan: Assitant Department Manager SHE [10.02, 12/6/2026] Marwa Efira K. PT Smelting: Izin pak/bu nanti untuk dokumen perbaikannya kami input lagi ke OSS atau bagaimana ya? berikut emailnya pak/bu: mmuchson@fmi.com Apakah boleh ya pak/bu jika di cc/bcc ke mkarunia@fmi.com dan arachmaw@fmi.com juga?	PT Smelting		[10.00, 12/6/2026] Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan: mhn info siapa nama dan jabatan serta email yg akan ttd BA verdok kemarin bu? [10.07, 12/6/2026] Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan: nanti menunggu kita kembalikan dulu melalui BA bu setelah itu upload perbaikan [10.09, 12/6/2026] Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan: Berikut emailnya pak/bu: mmuchson@fmi.com Apakah boleh ya pak/bu jika di cc/bcc ke mkarunia@fmi.com dan arachmaw@fmi.com juga? baik bu nanti yg di cc hanya yg ikut verdok kemarin bu untuk juga bisa paraf di setiap halaman BA nya	Selesai	10 Juni 2026	
13		Whatsapp	11 Juni 2026	Permintaan Informasi	Selamat pagi Pak/Bu, izin konfirmasi terkait pengajuan izin ALSE PT SGPJB , kami sudah mengikuti sistem yang ada. Permohonan kami di tanggal 7 Mei 2026, infonya sudah sampai proses review Wakil Menteri. Mohon izin info untuk update progressnya dapat kami akses darimana ya Pak/Bu? lalu izin Pak/Bu, mohon informasi apakah ada contact person Dit Kolom Air yang dapat saya hubungi?	PT SGPJB		ke hotline PKKPRL ya pak, berikut nomornya	Selesai	11 Juni 2026	
14		Whatsapp	12 Juni 2026	Permintaan Informasi	[13.58, 12/6/2026] +62 818-527-989: Selamat siang [14.02, 12/6/2026] +62 818-527-989: Yth. Bapak/Ibu, Izin melakukan konfirmasi terkait perizinan pengambilan dan pemanfaatan air laut untuk kegiatan pengolahan garam serta kegiatan pengolahan air laut untuk berbagai keperluan non-energi, termasuk namun tidak terbatas pada penyediaan air bersih, air baku, dengan KBLI 36001 dan 36002 Mohon informasi terkait hal-hal sebagai berikut: 1. Instansi dan/atau pejabat yang berwenang menerbitkan perizinan pengambilan dan pemanfaatan air laut untuk kegiatan tersebut. * Menteri, kementerian, atau instansi manakah yang berwenang menerbitkan perizinan dimaksud? * Apakah kewenangan perizinan dilakukan secara berjenjang sesuai tingkat pemerintahan (kabupaten/kota, provinsi, atau pemerintah pusat), atau merupakan kewenangan pemerintah pusat secara langsung? * Apabila kewenangannya berbeda berdasarkan kapasitas, lokasi, atau karakteristik kegiatan usaha, mohon penjelasan mengenai pembagian kewenangan tersebut.	Perorangan ~Amelda Law		1. Untuk ruang lingkup dan kewenangan dapat merujuk Lampiran 1A PP 28/2025 KBLI 36001 atau 36002 2. Untuk persyaratan dapat merujuk ke permen kp 10/2021	Selesai	12 Juni 2026	

15		Whatsapp	15 Juni 2026	Permintaan Informasi	[15.58, 15/6/2026] +62 858-8807-7711: Selamat sore mohon informasi pemenuhan sertifikat standar 36001 apakah ada template permohonan dan pemenuhan persyaratan khusus kami mendapatkan penolakan pada pengajuan PT Artha Envirotama Nomor I-202212201123278443470 tanggal 3 Desember 2025,	PT Artha Envirotama		Utk kelengkapan dokumen ada di Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 10 tahun 2021 Berikut alurnya bu 1. KKPRL 2. Persetujuan lingkungan 3. Pemenuhan persyaratan dokumen sesuai dengan Permen KP 10 tahun 2021	Selesai	15 Juni 2026	
16		Whatsapp	15 Juni 2026	Permintaan Informasi	[07.41, 18/6/2026] +62 811-3111-1345: selamat pagi [07.45, 18/6/2026] +62 811-3111-1345: mengikuti arahan pengajuan perizinan berusaha skala mikro rendah ada kolom yg tidak muncul saat pengajuan [07.46, 18/6/2026] +62 811-3111-1345: bisa di bantu solusinya pak / bu	PT. Sri Kando Aquarium		[16.59, 18/6/2026] Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan: Selamat sore pak. Maaf slow respon. Bisa konsultasi dengan BKPM ya pak [16.59, 18/6/2026] Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan: Ke OSS langsung ya [17.00, 18/6/2026] Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan: Buka OSS nanti muncul dibawah wa pengaduan	Selesai	15 Juni 2026	
17		Whatsapp	19 Juni 2026	Permintaan Informasi	Selamat pagi min, Saya mau tanya untuk data Biaya pembangunan itu maksudnya biaya secara keseluruhan sama gedung atau hanya biaya instalasi dalam proses alse itu saja? Karena 1 gedung itu ada berbagai kegiatan didalamnya tidak hanya alse	-		Selamat siang pak. Khusus ALSE saja ya pak	Selesai	19 Juni 2026	
18		Whatsapp	19 Juni 2026	Permintaan Informasi	Assalamualaikum Bu, mau tanya apakah benar bagi perusahaan yg blm mendapatkan Persetujuan Rencana Lokasi Prioritas (PRLP) dan Sudah dpt PRLP tp blm membayar PKKPRL, harus mengajukan permohonan ijin ulang. Tks Salam	-		waslm selamat pagi pak. 1. yang belum harus mempunyai Lokprl terlebih dahulu 2. yang sudah dan amsh aktif, harus menyelesaikan PKKPRL dulu	Selesai	19 Juni 2026	
19		Whatsapp	22 Juni 2026	Permintaan Informasi	[13.35, 19/6/2026] +62 819-0500-5476: Selamat siang 🙏, saya Herminto dari PT.Rodamas, ingin diskusi mengenai perizinan ALSE 🙏 Kalau saya mau diskusi tatap muka ke kantor KKP, apakah bisa Pak/Bu ? 🙏 Bertemu dengan siapakah ? 🙏 Kapan dan jam berapa Pak/Bu?	PT.Rodamas		[13.52, 22/6/2026] Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan: Selamat siang pak Mhn maaf baru dibalas pak. Konsultasi terkait apa ya pak? sesuai arahan pimpinan, dijadwalkan konsultasi offline	Selesai	22 Juni 2026	
20		Whatsapp	22 Juni 2026	Permintaan Informasi	Siang Bpk/Ibu. Permohonan pendaftaran alamat email Akun Mandat PT Chandra Asri Pacific Tbk,Site Puloampel kenapa bisa bs masuk ya Pak	PT Candra Energi Pacific		Selamat pagi pak, bisa klik lupa kata sandi ya nanti ada email masuk untuk reset password	Selesai	22 Juni 2026	
21		Whatsapp	23 Juni 2026	Permintaan Informasi	Pemenuhan Persyaratan sudah di submit kembali mohon untuk di cek ya pak	PT. Krakatau Chandra Energi		baik terima kasih	Selesai	23 Juni 2026	
22		Whatsapp	23 Juni 2026	Permintaan Informasi	Selamat siang, Kami dari PT. Langkara Maritim Jaya Bersama kami informasikan bahwa kamj telah melakukan submit surat permohonan dan proposal melalui email sedimentasiperizinan@kkp.go.id Mohon konfirmasi dan arahan lebih lanjut. Terima kasih	PT Langkara Maritim Jaya		selamat siang. baik pak. terima kasih. mohon dikirimkan juga ke nomor ini ya pak	Selesai	23 Juni 2026	

23		Whatsapp	23 Juni 2026	Permintaan Informasi	Selamat siang, Perkenalkan saya dari PT Sri Kandi Aquarium. Saya ingin menanyakan terkait data teknis pada Izin Usaha ALSE yang terbit secara otomatis melalui sistem. Apakah data teknis yang sudah terbit tersebut masih dapat dilakukan perubahan atau pengeditan? Jika bisa, mohon informasi mengenai prosedur dan tahapan yang perlu kami lakukan. Terima kasih atas bantuan dan informasinya.	PT Sri Kandi Aquarium.			[14.27, 23/6/2026] Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan: selamat siang bu. untuk perubahan/ pengeditan di sistem dapat menghubungi OSS lgsg ya bu [14.27, 23/6/2026] Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan: karena yang terbit otomatis tidak masuk panel kami	Selesai	23 Juni 2026	
24		Whatsapp	23 Juni 2026	Permintaan Informasi	Selamat Siang, saya Haykel dari PT Dwidaya Tambang Energi, ingin mengirimkan Permohonan Pemanfaatan Pasir Laut beserta proposal nya untuk Permohonan Izin Lokasi [14.24, 23/6/2026] +62 877-7667-4690: baik, akan segera saya kirimkan ke email tersebut terima kasih. mohon konfirmasi nya apabila sudah diterima dan saya mau bertanya untuk pengurusan pergantian koresponden ini proses nya bagaimana? karena ada pergantian PIC dari kami	PT Dwidaya Tambang Energi			proposal permohonan dapat dikirimkan ke email sedimentasiperizinan@kkp.go.id dan ke hotline ini ya pak terima kasih [14.38, 23/6/2026] Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan: dokumen sudah kami terima dan akan kami lakukan verifikasi secepatnya mohon diinformasikan dengan surat resmi ya pak	Selesai	23 Juni 2026	
25		Whatsapp	24 Juni 2026	Permintaan Informasi	Pagi bapak / ibu mohon informasi ini kita cb mau urus ALSE di KBLI 36002 untuk kegiatan kami tambak udang, tp setelah kami mau urus KBLI tersbut pengecualian di kegiatan kami.. mohon arahnya	PT Koyo Segoro Endah			Untuk tambak udang tetap wajib mengurus perizinan Berusaha pemanfaatan ALSE ya pak	Selesai	24 Juni 2026	
26		Whatsapp	25 Juni 2026	Permintaan Informasi	Asm. Izin pak. Kalau kbli 36002 ini tetep harus ditambahkn di akta perusahaan kan ya? Walaoun termasuk keg pendukung?	Dinas Kelautan Bangka Belitung			tidak perlu pak	Selesai	25 Juni 2026	
27		Whatsapp	26 Juni 2026	Permintaan Informasi	Terkait kegiatan yg dilakukan oleh pemerintah dan bukan untuk kegiatan berusaha tetap harus melakukan permohonan perizinan berusaha ya pak?	-			lyaaa. permohonan lewat PTSA KKP bu	Selesai	26 Juni 2026	
28		Whatsapp	25 Juni 2026	Permintaan Informasi	Pagi Bapak/Ibu ini dari PT. Anugerah Laut Bangka, kami mau bertanya apakah nanti akan diadakan sosialisasi mengenai KBLI 36002 untuk kegiatan tambak di Bangka Belitung?	PT Anugerah Laut Bangka			selamat pagi pak. belum ada pak. jika ada pertanyaan bisa ke wa hotline ini ya pak	Selesai	25 Juni 2026	
29		Whatsapp	25 Juni 2026	Permintaan Informasi	Selamat Pagi Pak, izin untuk setiap meeting yang diadakan oleh KKP mengenai Pemanfaatan hasil sedimentasi laut apakah kami bisa mendaftarkan email atau whatsapp untuk menerima undangan2 selanjutnya? Soalnya undangan yang kami terima selama ini hanya melalui forward dari TSD(salah satu pelaku usaha). Tujuannya supaya kami mendapatkan undangannya langsung, tepat waktu & bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu, soalnya kedepannya kami berkontrak tidak hanya dengan TSD. Mohon bantuannya, terimakasih [10.04, 25/6/2026] Ricky PT Port Engineering CSCEC Indonesia: Mohon informasinya jika kami bisa mendaftarkan email atau whatsapp ya pak [10.30, 25/6/2026] Ricky PT Port Engineering CSCEC Indonesia: boleh email dan nomor wa ya pak. disampaikan ke nomor ini Baik pak: 1. General Manager: Bpk. Pan Feng +62 852-6563-3489 / alex_pf@qq.com 2. Marketing Manager: Bpk. Ricky +62 852-3211-8413 / lanxiaoming001@outlook.com	PT Port Engineering CSCEC Indonesia			boleh email dan nomor wa ya pak. disampaikan ke nomor ini	Selesai	25 Juni 2026	

30		Whatsapp	26 Juni 2026	Permintaan Informasi	[14.39, 26/6/2026] +62 821-7599-1308: Selamat Siang Saya Dimas Saya izin bertanya perihal perizinan reklamasi 1. Siapa yang menerbitkan izin Reklamasi di area Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi sebuah kota yang tidak ada keterangan Nasional/Provinsi/Kotanya? Menteri atau Gubernur? 2. Terkait dokumen teknis seperti Rencana Induk Reklamasi, Studi Kelayakan, dan Rancangan Detail Reklamasi apakah bisa diisi/dibuat oleh Konsultan?	Dimas			selamat siang pak. untuk reklamasi ke direktorat Jasa Bahari ya	Selesai	26 Juni 2026	
31		Whatsapp	26 Juni 2026	Permintaan Informasi	Selamat pagi pak... Apakah proses verifikasi dokume kami terdapat kendala??	PT Segara Marina Berkat			dijadwalkan asistensi senin siang ya pak	Selesai	26 Juni 2026	
32		Whatsapp	29 Juni 2026	Permintaan Informasi	[09.25, 26/6/2026] +62 812-8623-4877: selamat siang.. [09.26, 26/6/2026] +62 812-8623-4877: saya Gega dari LDC East Indonesia - Balikpapan [09.26, 26/6/2026] +62 812-8623-4877: saya ingin melengkapi dokumen perijinan berusaha ALSE nomor ID Ijin oss : I-202409171100052641244 [09.27, 26/6/2026] +62 812-8623-4877: saya ngga bisa melengkapi dokumennya melalui OSS, karena menghilang dari daftar kelola Usaha kemudian di kegiatan usaha hilang, jadi saya coba buat baru lagi, tp ternyata ngga perlu buat baru lagi	LDC East Indonesia - Balikpapan			[07.32, 29/6/2026] Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan: selamat pagi pak [07.33, 29/6/2026] Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan: apakah di kegiatan usahanya sudah muncul? [07.33, 29/6/2026] Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan: karena ini biasanya ng bug dari OSS nya [09.37, 29/6/2026] Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan: coba ke live chat nya OSS ya pak. kami sama2 user juga pak di OSS. semoga ada jawaban dari OSS nya nanti	Selesai	29 Juni 2026	
33		Whatsapp	30 Juni 2026	Permintaan Informasi	[11.41, 29/6/2026] +62 857-5502-7905: Selamat siang, Terima kasih atas tanggapan suratnya akan kami proses sesuai isi dari surat. terima kasih [11.44, 29/6/2026] +62 857-5502-7905: selain itu pa izin mau bertanya kalau perihal surat kami yang sebelumnya kalau untuk surat kami dengan nomor surat 023/TUS/VI/2026 tanggal 11 Juni 2026 perihal Permohonan Persetujuan Lokasi apakah juga sudah di terima pa ?	PT Teraju Usaha Sukses			[07.12, 30/6/2026] Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan: Selamat Pagi Pak [07.12, 30/6/2026] Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan: mhn ijin kami akan menyiapkan surat balasan untuk nomor 203 pak	Selesai	30 Juni 2026	
34		Whatsapp	30 Juni 2026	Permintaan Informasi	Selamat siang bapak/ibu verifikator KKP. Terkait proposal sedimentasi yang telah kami upload, apakah perlu ada perbaikan atau persyaratan lain yang harus kami penuhi. Mohon arahan bapak ibu 🙏 Mohon izin bapak/ibu, group kami bermaksud menyusulkan 2 permohonan proposal tambahan atas nama perusahaan yang berbeda. Apakah cukup softfile dikirim ke nomor hotline ini? Ataukah kami juga dapat menyerahkan hardcover (print) ke departemen PRL KKP seperti pada tahapan gelombang pertama. Sekali lagi mohon arahan bapak/ibu verifikator 🙏	PT. Seabed Mineral Indonesia dan PT. Karimun Bukit Samudera.			[07.02, 1/7/2026] Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan: Selamat Pagi Bapak Mhn ijin untuk proposal dapat dikirimkan melalui email sedimentasiperizinan@kkp.go.id dengan 1 proposal per email subject ditulis format: Proposal IPPL_nama perusahaan terima kassih Pak	Selesai	30 Juni 2026	

FORMAT REKAPITULASI PENANGANAN PENGADUAN
 DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
 PERIODE BULAN JANUARI 2026

No	ID Tracking	Sumber Pengaduan	Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Data Pengadu	Penanganan		Tindaklanjut		Tanggal Tindaklanjut	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Uraian	Status		12
1	#02622143926869	Whatsapp	22/01/2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi mengenai perizinan dasar apa yang digunakan pada pengajuan SIPJI? Apakah menggunakan PKKPR Darat atau PKKPR Laut?				Admin hotline setditjen PK memberikan informasi bahwa biasanya pelaku usaha memiliki kegiatan usahanya (kantor/gudang) di darat sehingga PKKPR Darat yang digunakan. Sehingga dapat disesuaikan kembali dimana lokasi kegiatan usahanya.	Tuntas	22/01/2026	
2	#25372622144024	Whatsapp	22/01/2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi mengenai prosedur resmi reklamasi pantai				Admin hotline setditjen PK memberikan flyer terkait prosedur dan penjelasan terkait perizinan reklamasi	Tuntas	22/01/2026	
3	#2622144153631	Whatsapp	22/01/2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi terkait kuota ekspor jenis ikan				Admin hotline setditjen PK memberikan informasi bahwa saat ini pengajuan kuota ekspor belum dapat dilakukan dikarenakan masih menunggu kepdirljen tentang kuota.	Tuntas	22/01/2026	
4	#25372622144239	Whatsapp	22/01/2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi terkait KBLI baru untuk permohonan SIPJI				Admin hotline setditjen PK telah memberikan informasi bahwa implementasi KBLI SIPJI saat ini masih menggunakan KBLI tahun 2020.	Tuntas	22/01/2026	
5	#25372622144349	Whatsapp	22/01/2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi mengenai status penerbitan billing PNBP PT Agro Makmur Raya				Admin hotline setditjen telah memberikan informasi bahwa billing PNBP untuk PT Agro Makmur Raya akan diterbitkan hari ini	Tuntas	22/01/2026	
6	#25372622144613	Whatsapp	22/01/2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi mengenai bagaimana cara membuat SIPJI Hiu				Admin hotline setditjen PK telah memberikan informasi bahwa saat ini pengajuan SIPJI untuk jenis hiu sedang moratorium sehingga belum bisa dapat dilakukan pengajuan	Tuntas	22/01/2026	
7	#25372622144708	Whatsapp	22/01/2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi terkait status permohonan SIPJI Pengembangbiakan CV Amanah Globalindo Sejahtera				Admin hotline setditjen PK telah memberikan informasi bahwa saat ini SIPJI CV Amanah Globalindo Sejahtera sedang dalam proses penerbitan di OSS	Tuntas	22/01/2026	
8	#25372622144745	Whatsapp	22/01/2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi mengenai akun SAJI yang tidak dapat diakses kembali				Admin hotline setditjen PK telah memberikan informasi terkait akun yang baru sehingga sudah dapat diakses kembali.	Tuntas	22/01/2026	
9	#25372622144818	Whatsapp	22/01/2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi mengenai bagaimana prosedur untuk mengirim jenis kulit buaya				Admin hotline setditjen PK telah memberikan informasi bahwa jika masih memiliki izin SATDN yang masih berlaku dari Kementerian Kehutanan maka cukup untuk menggunakan dokumen tersebut.	Tuntas	22/01/2026	
10	#25372622144854	Whatsapp	22/01/2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi mengenai pendaftaran akun SAJI yang belum juga terverifikasi				Admin hotline setditjen PK telah memberikan informasi bahwa saat ini aplikasi SAJI dalam tahap pengembangan mengingat terdapat perubahan OTK pada DJPK sehingga belum dapat digunakan sebagaimana mestinya.	Tuntas	22/01/2026	
11	#25372622144959	Whatsapp	22/01/2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi mengenai dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk ekspor Arwana				Admin hotline setditjen PK telah memberikan informasi bahwa untuk ekspor arwana maka perlu memiliki SAJI, SIPJI Pengembangbiakan, dan SIPJI LN	Tuntas	22/01/2026	
12	#25372622145051	Whatsapp	22/01/2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi mengenai status permohonan izin pemanfaatan pulau-pulau kecil PT Pretty Sally Indonesia				Admin hotline setditjen PK telah memberikan informasi bahwa saat ini status permohonan dalam proses penerbitan	Tuntas	22/01/2026	

FORMAT REKAPITULASI PENANGANAN PENGADUAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
PERIODE BULAN FEBRUARI 2026

No	ID Tracking	Sumber Pengaduan	Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Data Pengadu	Penanganan		Tindaklanjut		Tanggal Tindaklanjut	Keterangan
							Verifikator	Penelaah	Uraian	Status		
1	#02609103647348	Whatsapp	9 Feb 2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi mengenai berapa lama pembuatan akun SAJI sampai disetujui karena ingin mengirim benih ikan sidat				Admin hotline setditjen PK telah memberikan informasi bahwa jika ingin membuat SAJI maka perlu memiliki SIPJI terlebih dahulu. Admin hotline setditjen PK telah mengarahkan agar pelaku usaha dapat mengajukan SIPJI terlebih dahulu, baru kemudian dapat membuat akun SAJI	Selesai	9 Feb 2026	
2	#02609103732166	Whatsapp	9 Feb 2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi apakah dalam pengajuan SIPJI dengan KBLI 03274 membutuhkan SIUP perdagangan dengan KBLI 47753/46206?				Admin hotline setditjen PK telah memberikan informasi bahwa sesuai dengan PP 28/2025 SIUP dengan KBLI perdagangan (46206, 47753, 47215) sudah tidak dipersyaratkan dalam permohonan SIPJI. Sehingga cukup dengan KBLI 03274 dapat mengajukan permohonan SIPJI LN.	Selesai	9 Feb 2026	
3	#02609103810153	Whatsapp	9 Feb 2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi mengenai kendala pada permohonan SIPJI yang tidak dapat memilih lokasi di darat				Admin hotline setditjen PK telah berkoordinasi dengan tim teknis dan meneruskan informasi kepada pelaku usaha bahwa terkait RDTR yang belum terdaftar tersebut dapat bersurat ke Kementerian ATR/BPN untuk dilakukan penilaian pertimbangan teknis pertanahan	Selesai	9 Feb 2026	
4	#2609103850353	Whatsapp	9 Feb 2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi mengapa KBLI 03224 yang digunakan pada SIPJI saat ini belum dapat diproses di OSS				Admin hotline setditjen PK telah memberikan informasi bahwa saat ini dalam permohonan Arwana masih menggunakan KBLI 03271. KBLI baru (03224) belum diimplementasikan saat ini sehingga belum muncul di OSS.	Selesai	9 Feb 2026	
5	#02609103930049	Whatsapp	9 Feb 2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi mengenai apakah pengurusan SIPJI untuk Ikan Sidat dan Teripang bisa langsung SIPJI Perdagangan Luar Negeri ?				Admin hotline setditjen PK telah memberikan informasi bahwa hal tersebut dapat dilakukan jika pelaku usaha hanya sebagai penjual ikan sidat dan teripang tanpa melakukan pengembangbiakannya. Namun jika dilakukan juga maka perlu memiliki SIPJI Pengembangbiakan. Karena saat memohonkan SAJI LN diperlukan SIPJI Pengembangbiakannya.	Selesai	9 Feb 2026	
6	#02609104004631	Whatsapp	9 Feb 2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi mengenai KBLI Izin Produksi Garam				Admin hotline setditjen PK telah memberikan informasi bahwa Jika ekstraksi garam yang dilakukan memiliki skala industri, maka bagaimanapun tekniknya tetap memerlukan KBLI 08930. Kemudian, jika pemanfaatan air laut hanya benar-benar digunakan untuk ekstraksi garam maka tidak memerlukan KBLI 36002. Namun, jika terdapat pemanfaatan air laut misal untuk pekerja, atau untuk operasional lainnya selain ekstraksi garam maka memerlukan KBLI 36002.	Selesai	9 Feb 2026	
7	#02619140911711	Whatsapp	19 Feb 2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi mengenai format proposal SIPJI terbaru				Admin hotline setditjen PK telah memberikan informasi bahwa untuk format proposal SIPJI masih sama dengan yang sebelumnya.	Selesai	19 Feb 2026	
8	#02619140952930	Whatsapp	19 Feb 2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi mengenai surat permohonan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka PMA. Pada surat tersebut, terdapat nomor KTP yang harus diisi sedangkan presdir pada perusahaan merupakan Tenaga Kerja Asing, apakah bisa diganti dengan identitas lain?				Admin hotline setditjen telah memberikan informasi bahwa terkait hal tersebut dapat diisi dengan nomor paspor.	Selesai	19 Feb 2026	
9	#02619141052448	Whatsapp	19 Feb 2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi mengenai pelaku usaha yang ingin melakukan ekspor kerang yang tidak dilindungi, namun negara tujuan dalam hal ini India memberlakukan aturan perlu melampirkan sertifikat CITES				Admin hotline setditjen PK telah memberikan informasi bahwa jika kerang yang ingin di ekspor bukan termasuk jenis dilindungi, maka tidak dapat dikeluarkan sertifikat CITES. Perlu melampirkan surat resmi dari negara tujuan apabila memang membutuhkan sertifikat CITES.	Selesai	19 Feb 2026	

10	#02619141139079	Whatsapp	19 Feb 2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi mengenai bagaimana cara mendaftarkan SIPJI				Admin hotline setditjen telah memberikan informasi bahwa untuk permohonan SIPJI maka pelaku usaha perlu menghubungi UPT terdekat lokasi usaha untuk memohonkan BAP Verifikasi Lapang, kemudian juga memiliki NIB dengan KBLI SIPJI. Jika sudah, pelaku usaha dapat melanjutkan mengajukan permohonan SIPJI melalui OSS dengan format terlampir	Selesai	19 Feb 2026	
11	#02619141515346	Whatsapp	19 Feb 2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi mengenai yayasan yang sedang membantu kolaborasi penelitian. Dalam rencana penelitian, akan dilakukan transfer sampel biota laut jenis yang dilindungi sehingga membutuhkan izin CITES. Bagaimana caranya?				Admin hotline setditjen PK telah memberikan informasi bahwa terkait hal tersebut dapat bersurat terlebih dahulu kepada Direktur Konservasi Spesies dan Genetik agar selanjutnya dapat diterbitkan surat rekomendasi. Jika sudah mendapat rekomendasi maka selanjutnya dapat melanjutkan permohonan ke BRIN	Selesai	19 Feb 2026	
12	#11026170746111	LAPOR!	20 Feb 2026	Permintaan Informasi	Permintaan informasi yang masuk melalui LAPOR terkait regulasi perdagangan koral mati				Karang keras (<i>Scleractinia</i> spp.) merupakan spesies yang tercantum dalam Appendiks II CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), sehingga pemanfaatannya dikendalikan untuk menjamin keberlanjutan populasi di alam, termasuk perlindungan terhadap habitatnya. Dalam kerangka hukum nasional, pengambilan dan/atau perdagangan patahan karang (coral rubble) dari ekosistem terumbu karang pada prinsipnya tidak diperbolehkan karena terumbu karang merupakan habitat sumber daya ikan. UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan melarang setiap orang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya, sementara UU No. 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melarang kegiatan penambangan atau pengambilan material di wilayah pesisir yang menimbulkan kerusakan ekosistem. Selaras dengan itu, Permen KP No. 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks CITES menegaskan bahwa pemanfaatan karang hanya dapat dilakukan terhadap spesimen yang berasal dari sumber legal dan berizin, sehingga pengambilan coral rubble langsung dari ekosistem terumbu karang untuk tujuan komersial, termasuk jual beli sebagai bahan bangunan, dapat	Selesai	20 Feb 2026	

FORMAT REKAPITULASI PENANGANAN PENGADUAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
PERIODE BULAN MARET 2026

No	ID Tracking	Sumber Pengaduan	Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Data Pengadu	Penanganan		Tindakanlanjut		Tanggal Tindakanlanjut	Keterangan
							Verifikator	Penelaah	Uraian	Status		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
1	#02609103516528	Whatsapp	9 Mar 2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi mengenai bagaimana proses perpanjangan SIPJI				Admin hotline setditjen PK telah memberikan informasi bahwa saat ini untuk perizinan SIPJI belum terdapat mekanisme perpanjangan, sehingga perlu mengajukan kembali dari awal melalui OSS.	Selesai	9 Mar 2026	
2	#02609103622640	Whatsapp	9 Mar 2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi mengenai dokumen apa yang harus di upload pada bagian "Persyaratan Izin Lainnya" di OSS				Admin hotline setditjen PK telah memberikan informasi bahwa pada bagian "Persyaratan Izin Lainnya" bersifat opsional sehingga jika tidak ada dokumen penunjang yang perlu di upload, maka dapat dilewati saja	Selesai	9 Mar 2026	
3	#02609103749938	Whatsapp	9 Mar 2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi mengenai dokumen surat pernyataan kesedian membayar PNBPN. Apakah materai pada surat tersebut harus materai biasa atau bisa menggunakan e-materai?				Admin hotline setditjen PK telah memberikan informasi bahwa materai yang digunakan dapat berupa fisik maupun digital	Selesai	9 Mar 2026	
4	#02609104055479	Whatsapp	9 Mar 2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi mengenai ekspor hiu/pari untuk konservasi di luar negeri				Admin hotline setditjen PK telah memberikan informasi bahwa terkait ekspor hiu/pari saat ini sedang moratorium.	Selesai	9 Mar 2026	
5	#02609104204725	Whatsapp	9 Mar 2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK mendapatkan surat terkait kendala yang dialami pelaku usaha pada akun SAJI				Admin hotline setditjen PK telah berkoordinasi dengan tim teknis dan meneruskan informasi atas kendala yang dialami pelaku usaha: 1. Untuk perubahan email pada akun e-SAJI silahkan menghubungi Admin UPT. 2. Nama Bandar Udara (ke) pada formulir permohonan diketik secara manual. 3. Pada formulir permohonan terdapat opsi Jenis Pengangkutan untuk ekspor, re-ekspor dan impor. 4. Syarat membuat permohonan SAJI DN/LN adalah terlebih dahulu membuat kartu stok dan melakukan input mutasi stok agar sistem mengenali akun Anda memiliki stok tersedia. 5. Silakan konsultasi dengan petugas pelayanan di UPT wilker setempat terkait kebutuhan lampiran dokumen dalam permohonan (kebutuhan lampiran mungkin dapat berbeda-beda). UPT wilayah kerja Jakarta di bawah BPK Pontianak. Silahkan dapat konsultasikan dengan BPK Pontianak melalui hotline berikut untuk diarahkan ke wilayah kerja Jakarta. Terima kasih	Selesai	9 Mar 2026	
6	#02609104244880	Whatsapp	9 Mar 2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi mengenai kontak yang dapat dihubungi untuk mengirimkan undangan kegiatan FGD yang ditujukan untuk DJPK dan DJPRL				Admin hotline setditjen PK telah memberikan informasi bahwa surat undangan dapat disampaikan melalui hotline setditjen DJPK di nomor 081292290511 dan hotline DJPRL di nomor 087762250001	Selesai	9 Mar 2026	

FORMAT REKAPITULASI PENANGANAN PENGADUAN
 DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
 PERIODE BULAN APRIL 2026

No	ID Tracking	Sumber Pengaduan	Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Data Pengadu	Penanganan		Tindakanlanjut		Tanggal Tindakanlanjut	Keterangan
							Verifikator	Penelaah	Uraian	Status		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
1	#02607104822589	Whatsapp	7 Apr 2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi mengenai bagaimana permohonan SIPJI untuk jenis Buaya				Admin hotline setditjen PK telah memberikan informasi bahwa kegiatan budidaya diperlukan SIPJI Pengembangbiakan dalam pemanfaatannya. Jika terdapat kegiatan perdagangan maka diperlukan SIPJI Perdagangan Dalam dan/atau Luar Negeri. KBLI untuk buaya dapat dipilih sesuai sumbernya, yakni 03157 (pengambilan dari alam) atau 03277 (hasil pengembangbiakan). Sebelum pengajuan SIPJI di OSS, pelaku usaha perlu memiliki BAP Verifikasi Lapang, dalam pembuatan berita acara verifikasi lapang, silakan pelaku usaha menghubungi tim UPT PK terdekat lokasi usaha. Untuk upload dokumen persyaratan, menu Perizinan Berusaha > Pemenuhan Persyaratan > pilih KBLI pengajuan SIPJI > klik tombol Proses Perizinan Berusaha. Format dokumen persyaratan SIPJI dapat akses link berikut https://bit.ly/persyaratan-sipji .	Tuntas	7 Apr 2026	
2	#02607104859777	Whatsapp	7 Apr 2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi mengenai penolakan permohonan SIPJI pada OSS				Admin hotline setditjen PK telah meneruskan informasi dari tim teknis bahwa terkait dokumen yang perlu diupload adalah SIPJI yang diterbitkan sebelum UU Cipta Kerja seperti contoh berikut. Silahkan mengajukan perbaikan permohonan dengan mengupload dokumen yang diperlukan tersebut.	Tuntas	7 Apr 2026	
3	#02607104930385	Whatsapp	7 Apr 2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi mengenai bagaimana cara melakukan perubahan nama badan usaha pada akun SAJI				Admin hotline setditjen PK telah memberikan informasi bahwa terkait perubahan nama badan usaha akun SAJI dapat dibantu oleh tim teknis. Pelaku usaha telah memberikan nama yang akan diubah dan telah dibantu ubah oleh tim teknis.	Tuntas	7 Apr 2026	
4	#02607105038568	Whatsapp	7 Apr 2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi apakah email surat.kkp@gmail.com merupakan alamat email resmi KKP?				Admin hotline setditjen PK telah memberikan informasi bahwa alamat email tersebut tidak valid karena KKP menggunakan domain kkp.go.id	Tuntas	7 Apr 2026	
5	#02607105126505	Whatsapp	7 Apr 2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi apakah jika memanfaatkan air laut sebagai pendingin dan kembali ke laut tetap harus memiliki izin ALSE?				Admin hotline setditjen PK telah memberikan informasi terkait hal tersebut perlu mengajukan permohonan izin ALSE melalui OSS dengan KBLI 36002.	Tuntas	7 Apr 2026	
6	#02614092331696	Whatsapp	14 April 2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi mengenai progress permohonan SIPJI PT Bintang Jayakota				Admin hotline setditjen PK telah memberikan informasi bahwa saat ini permohonan menunggu jadwal verifikasi oleh tim teknis.	Tuntas	14 April 2026	
7	#02614092405712	Whatsapp	14 April 2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi kontak hotline DJPRL karena sedang mengalami kendala verifikasi persyaratan dasar PKKPRL yang sudah dimiliki saat pengajuan Izin Wisata Tirta Lainnya				Admin hotline setditjen PK telah memberikan informasi mengenai kontak hotline DJPRL	Tuntas	14 April 2026	
8	#02614092434017	Whatsapp	14 April 2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi mengenai notifikasi perpanjangan SIPJI				Admin hotline setditjen PK telah memberikan informasi bahwa SIPJI tidak ada perpanjangan melainkan membuat permohonan baru saat masa berlaku habis	Tuntas	14 April 2026	
9	#02614092508725	Whatsapp	14 April 2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi mengenai pengajuan permohonan SAJI yang sebelumnya sudah memiliki izin edar dari Kementerian Kehutanan				Admin hotline setditjen PK telah memberikan informasi bahwa terkait hal tersebut perlu melakukan BAP Verifikasi Lapang terlebih dahulu melalui BPK Denpasar	Tuntas	14 April 2026	
10	#02614092557484	Whatsapp	14 April 2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi mengenai SIPJI Hiu-Pari apakah sudah dibuka kembali registrasinya?				Admin hotline setditjen PK telah memberikan informasi bahwa untuk pengajuan SIPJI jenis hiu pari bagi pelaku usaha baru masih dalam status moratorium saat ini	Tuntas	14 April 2026	
11	#02620142344216	Whatsapp	20 April 2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi mengenai bagaimana cara mendapatkan dokumen SIPJI? Dikarenakan saat ini sedang mengajukan perpanjangan SIPJI namun ditolak karena harus melampirkan dokumen SIPJI				Admin hotline setditjen PK telah memberikan informasi bahwa permohonan pemrakarsa ditolak karena untuk proses pengajuan sesuai dengan PP 28 Tahun 2025 harus melampirkan dokumen persyaratan seperti surat permohonan, proposal, berita acara verifikasi lapang dan bukti bayar PNPB. Permohonan yang diajukan oleh pemrakarsa melalui menu pemutakhiran sehingga tidak melampirkan dokumen persyaratan yang menjadi alasan permohonan tersebut belum dapat dilanjut. Pemrakarsa dapat mengajukan kembali melalui menu pengajuan baru agar tidak tertolak.	Tuntas	20 April 2026	
12	#02620142452101	Whatsapp	20 April 2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi mengenai cara perhitungan nilai lahan reklamasi?				Admin hotline setditjen PK telah memberikan informasi bahwa untuk perhitungan PNPB Izin Pelaksanaan Reklamasi dapat dilihat pada Permen KP Nomor 14 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Lahan Reklamasi	Tuntas	20 April 2026	

13	#02620142559502	Whatsapp	20 April 2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi mengenai pengisian data pada pengajuan permohonan Rekomendasi Pulau-Pulau Kecil. Terdapat point pengisian luasan terumbu karang dan lamun dalam hektar. Bagaimana cara perhitungannya?				Admin hotline setditjen PK telah memberikan informasi bahwa terkait hal tersebut dapat dilihat pada situs https://sidako.kkp.go.id/sidako/map . Untuk menghitungnya dapat menggunakan tools arcmap dll. Untuk pengisian pada google form tahap 1 dapat diisi pakai nilai kisaran saja. sedangkan di dokumen rencana usaha nya dapat menggunakan jasa konsultan untuk bantu hitung luas nya.	Tuntas	20 April 2026	
14	#02620142639190	Whatsapp	20 April 2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi mengenai Rekomendasi Pulau-Pulau Kecil. Apakah jika sudah tersedia RDTR pada lokasi yang termasuk pulau-pulau kecil dibawah 100 km2 masih memerlukan rekomendasi pulau-pulau kecil?				Admin hotline setditjen PK telah memberikan informasi bahwa jika lokasi pulau kecil nya sudah terdapat RDTR maka tidak perlu mengajukan Rekomendasi Pulau-Pulau Kecil.	Tuntas	20 April 2026	
15	#02620142712557	Whatsapp	20 April 2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi mengenai persyaratan Rekomendasi Pulau-Pulau Kecil				Admin hotline setditjen PK telah memberikan informasi terkait persyaratan untuk P3K dapat melihat pada website pulaukecil.id yang terdapat contoh atau format untuk dokumen persyaratan. Selain persyaratan, terdapat peraturan, melihat peta pulau, simulasi PNBp, dan cara pengajuan. Pada menu Pengajuan terdapat 2 tahap, yakni tahap I dan tahap II. Tahap I dilakukan untuk verifikasi dokumen sebelum mengajukan permohonan di OSS sehingga jika ada revisi atau penambahan data tidak terjadi penolakan berulang	Tuntas	20 April 2026	
16	#02620142815657	Whatsapp	20 April 2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi terkait pendaftaran seleksi Kampung Nelayan Merah Putih untuk jabatan administrasi keuangan?				Admin hotline setditjen PK telah memberikan informasi bahwa terkait hal tersebut dapat mengunjungi situs https://phtc.panselnas.go.id/ atau menghubungi Contact Center di nomor 0821-1814-0960.	Tuntas	20 April 2026	
17	#02620142843889	Whatsapp	20 April 2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi mengenai prosedur dan mekanisme permohonan Izin ALSE				Admin hotline setditjen PK telah memberikan informasi terkait kegiatan tersebut memerlukan Izin ALSE dengan KBLI 36002 (Non Produk). Berikut alur permohonan Izin ALSE: 1. Pelaku usaha mengajukan permohonan ke OSS dengan KBLI 36002. Dokumen persyaratan dapat dilihat pada Permen KP 10/2021. 2. Jika dokumen yang diupload belum sesuai persyaratan Permen KP 10/2021, diberikan catatan perbaikan dan permohonan dikembalikan. Pelaku usaha dapat mengupload ulang dokumen perbaikan di menu Pemenuhan Persyaratan. 3. Jika dokumen yang diupload sesuai persyaratan Permen KP 10/2021, akan dilakukan verifikasi dokumen secara daring dan/atau luring oleh tim teknis dengan mengundang pelaku usaha dan pihak2 yang terkait. 4. Hasil verifikasi dokumen sudah lengkap, tim teknis melakukan verifikasi lapang. 5. Semua dokumen persetujuan telah lengkap dan disetujui oleh tim teknis, selanjutnya akan diterbitkan billing PNBp. Pelaku usaha yang telah membayar PNBp harus mengupload bukti bayar di OSS untuk diverifikasi oleh tim teknis. 5. Tim teknis akan memverifikasi PNBp dan menunggu persetujuan MKP 6. Surat izin terbit dengan adanya notif di OSS	Tuntas	20 April 2026	

FORMAT REKAPITULASI PENANGANAN PENGADUAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
PERIODE BULAN MEI 2026

No	ID Tracking	Sumber Pengaduan	Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Data Pengadu	Penanganan		Tindakanlanjut		Tanggal Tindakanlanjut	Keterangan
							Verifikator	Penelaah	Uraian	Status		
1	#02612140648893	Whatsapp	12 Mei 2026	Permintaan Informasi	Admin hotline Setditjen PK mendapat permintaan informasi terkait progress permohonan SIPJI atas nama Su Wen Ping				Admin hotline setditjen PK telah memberikan informasi bahwa SLA untuk SIPJI adalah 17 hari kerja sejak permohonan masuk. Saat ini dokumen masih dalam tahap <u>antre untuk di verifikasi. Mohon berkenan menunggu</u>		12 Mei 2026	
2	#02612140738343	Whatsapp	12 Mei 2026	Permintaan Informasi	Admin hotline Setditjen PK mendapat permintaan informasi apakah billing PNBP SIPJI benar ditagihkan dari OSS melalui whatsapp?				Admin hotline setditjen PK telah memberikan informasi bahwa terkait hal tersebut merupakan penipuan dan menghimbau pelaku usaha agar lebih waspada. Billing PNBP akan terbit secara resmi melalui akun OSS masing-masing.		12 Mei 2026	
3	#02612140818786	Whatsapp	12 Mei 2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK mendapat permintaan informasi mengenai tata cara pendaftaran SIPJI				Admin hotline setditjen PK memberikan informasi bahwa dalam permohonan SIPJI, pelaku usaha perlu menghubungi UPT kami yang terdekat dengan lokasi usaha saudara untuk mendapatkan BAP Verifikasi Lapang. Setelah mendapat BAP Verifikasi Lapang, saudara dapat mengajukan permohonan SIPJI melalui OSS dengan upload semua persyaratan yang diperlukan		12 Mei 2026	
4	#02612140902802	Whatsapp	12 Mei 2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi apakah pengajuan SAJI				Admin hotline setditjen PK telah memberikan informasi bahwa permohonan SAJI sudah ditolak. Pelaku usaha		12 Mei 2026	
5	#02612140939729	Whatsapp	12 Mei 2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi terkait billing PNBP untuk rekomendasi look alike species dan SAJI-DN				Admin hotline setditjen PK telah memberikan informasi bahwa untuk rekomendasi look alike species dan SAJI-DN dapat konsultasi lebih lanjut dengan Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar		12 Mei 2026	
6	#02612141011085	Whatsapp	12 Mei 2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi terkait permintaan pembayaran deposito untuk pengurusan SAJI				Admin hotline setditjen PK telah memberikan informasi bahwa terkait penagihan biaya deposito untuk SAJI dipastikan palsu. Mohon kepada pelaku usaha agar lebih waspada untuk selanjutnya.		12 Mei 2026	
7	#02612141054417	Whatsapp	12 Mei 2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi untuk penambahan alamat gudang pada akun SAJI				Admin hotline setditjen PK telah memberikan informasi bahwa permintaan penambahan alamat gudang untuk akun SAJI telah diteruskan ke tim teknis untuk ditindak lanjut. Pemrakarsa dapat menunggu hingga alamat pada akun saji nya bertambah		12 Mei 2026	
8	#02612141147765	Whatsapp	12 Mei 2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi mengapa ketika mengajukan sisa kuota untuk Prionace glauca 329.5kg tidak bisa?				Admin hotline telah berkoordinasi dengan tim teknis dan meneruskan ke pelaku usaha, hal tersebut terjadi karena kuota ekspor yang tersedia adalah 329kg		12 Mei 2026	
9	#02612141227409	Whatsapp	12 Mei 2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi mengapa ketika mengajukan SIPJI dengan KBLI 03151 tidak muncul di OSS?				Setelah ditinjau lebih lanjut oleh Admin hotline, Pelaku usaha mengajukan SIPJI melalui PB UMKU sehingga KBLI 03151 tidak muncul. Admin hotline setditjen memberikan informasi agar pelaku usaha dapat mengajukan SIPJI melalui panduan berikut https://oss.go.id/id/panduan/69102b5d67aecc64abaeef41		12 Mei 2026	
10	#02620101631104	Whatsapp	20 Mei 2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi mengenai pengisian tahap 2 pada OSS terkait perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA pada point 5 surat permohonan ditujukan ke siapa?				Admin hotline setditjen PK memberikan informasi bahwa terkait hal tersebut jika tidak ada mandatori maka dapat dikosongkan saja, namun jika terdapat mandatori dapat upload dokumen sama seperti nomor 1		20 Mei 2026	
11	#02620101713059	Whatsapp	20 Mei 2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi mengenai perbedaan luas lahan terkait izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA antara pengajuan dengan yang ada di OSS				Admin hotline setditjen telah memberikan informasi bahwa terkait hal tersebut untuk dilakukan penyesuaian/perbaikan data pada OSS agar konsisten dengan dokumen pengajuan dan data legalitas lahan yang dimiliki.		20 Mei 2026	
12	#02620101745407	Whatsapp	20 Mei 2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi apakah pembangunan resort perlu mengajukan izin wisata bahari?				Admin hotline setditjen PK telah memberikan informasi bahwa jika pembangunan resort pada kawasan konservasi maka pemrakarsa perlu mengajukan izin wisata bahari serta Surat Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi (SIUPKK)		20 Mei 2026	
13	#02620102237863	Whatsapp	20 Mei 2026	Permintaan Informasi	Admin hotline Setditjen PK mendapatkan permintaan informasi mengenai progress permohonan SIPJI PT Permata Bumi Kalbar				Admin hotline setditjen PK telah memberikan informasi bahwa saat ini permohonan dalam tahap menunggu verifikasi pembayaran PNBP		20 Mei 2026	

14	#02620102314355	Whatsapp	20 Mei 2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi mengenai mekanisme penerbitan SIPJI				Admin hotline setditjen PK telah memberikan informasi bahwa dalam permohonan SIPJI, terdapat proses pra-sipji yaitu saudara perlu mengajukan Berita Acara Verifikasi Lapang terlebih dahulu ke UPT kami yang terdekat dengan lokasi usaha saudara dalam hal ini Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak Satuan Pelayanan Jakarta, mengingat BA Verlap merupakan salah satu persyaratan yang perlu di upload di OSS dalam permohonan SIPJI. Kemudian, jika sudah memiliki BA Verlap, selanjutnya saudara dapat melengkapi persyaratan untuk pengajuan SIPJI di OSS sebagaimana link berikut: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1iIfdyFkw-vS7toi4ON56os6Nk3kCv0UI		20 Mei 2026	
15	#02620102351007	Whatsapp	20 Mei 2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi mengenai mekanisme penerbitan izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil				Admin hotline setditjen PK telah memberikan informasi bahwa setiap orang/pelaku usaha yang memanfaatkan pulau-pulau kecil perlu untuk memiliki Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil. Terkait regulasi, persyaratan, proses pengajuan saudara dapat melihat lebih detail pada situs pulaukecil.id.		20 Mei 2026	
16	#02620102807741	Whatsapp	20 Mei 2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi mengenai bagaimana prosedur mau kirim ikan pari jenis black diamond ke pontianak				Admin hotline setditjen PK telah memberikan informasi terkait pari jenis black diamond membutuhkan SIPJI (Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan) dalam pemanfaatannya. Kegiatan budidaya diperlukan SIPJI Pengembangbiakan dalam pemanfaatannya. Jika terdapat kegiatan perdagangan maka diperlukan juga SIPJI Perdagangan Dalam dan/atau Luar Negeri. KBLI untuk pari adalah 03151. Sebelum pengajuan SIPJI di OSS, pelaku usaha perlu memiliki BAP Verifikasi Lapang, dalam pembuatan berita acara verifikasi lapang, silakan pelaku usaha menghubungi tim UPT PK terdekat lokasi usaha. Untuk upload dokumen persyaratan, menu Perizinan Berusaha > Pemenuhan Persyaratan > pilih KBLI pengajuan SIPJI > klik tombol Proses Perizinan Berusaha. Format dokumen persyaratan SIPJI dapat akses link berikut https://bit.ly/persyaratan-sipji .		20 Mei 2026	
17	#02620102430258	Whatsapp	20 Mei 2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi mengenai prosedur perpanjangan SIPJI				Admin hotline setditjen PK memberikan informasi bahwa dalam permohonan SIPJI saudara perlu memiliki Berita Acara Verifikasi Lapang terlebih dahulu yang didapat dari Unit Pelaksana Teknis kami dalam hal ini Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar. Mohon berkenan menghubungi BPK Denpasar melalui hotline berikut (+62 811-3863-853) untuk pengajuan Berita Acara Verifikasi Lapang. Terima kasih		20 Mei 2026	

FORMAT REKAPITULASI PENANGANAN PENGADUAN
 DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
 PERIODE BULAN JUNI 2026

No	ID Tracking	Sumber Pengaduan	Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Data Pengadu	Penanganan		Tindaklanjut		Tanggal Tindaklanjut	Keterangan
							Verifikator	Penelaah	Uraian	Status		
1	#02604085807292	Whatsapp	04 Juni 2026	Permintaan Informasi	Admin setditjen PK mendapatkan permintaan informasi mengenai kapan KBLI baru 03110 mulai efektif?				Admin setditjen PK telah memberikan pengertian kepada pelaku usaha bahwa terkait implementasi KBLI baru sampai saat ini belum ada informasi lebih lanjut	Selesai	04 Juni 2026	
2	#25372604085922	Whatsapp	04 Juni 2026	Permintaan Informasi	Admin setditjen PK mendapatkan permintaan informasi mengenai progress permohonan SIPJI				Admin setditjen PK telah memberikan informasi bahwa saat ini pembayaran PNBP oleh pelaku usaha sedang dalam tahap proses validasi oleh tim teknis	Selesai	04 Juni 2026	
3	#02604090001922	Whatsapp	04 Juni 2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi bagaimana prosedur penambahan alamat gudang pada lampiran SIPJI				Admin setditjen PK telah memberikan informasi berupa format pengajuan penambahan alamat gudang pada lampiran SIPJI	Selesai	04 Juni 2026	
4	#44926060236083	LAPOR!	8 Juni 2026	Permintaan Informasi	Permohonan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) yang Dilindungi dan/atau Termasuk ke dalam Appendiks CITES, Perdagangan Dalam Negeri selamat Pagi saya ingin melapor kan / atau ingin bertanya perihal proses penerbitan kode billing / PNBP untuk izin perdagangan dalam negeri pemanfaatan jenis ikan (SIPJI) Dalam Negeri, berapa lamakah Kode Billing/PNBP itu saya dapatkan dan verifikasi oleh verifikator kementerian kelautan dan perikanan berapa lama begitu syarat yang saya ajukan dinyatakan lengkap tinggal menunggu verifikasi. terimakasih				Yth. Bapak Irwan Syahputra, Terima kasih telah menyampaikan pertanyaan dan aspirasi Bapak melalui layanan LAPOR! Menindaklanjuti permohonan Bapak terkait informasi proses penerbitan kode billing / Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk permohonan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) Perdagangan Dalam Negeri, bersama ini kami sampaikan penjelasan detail mengenai tahapan, persyaratan, serta jangka waktu proses sebagai berikut: 1. Status Verifikasi Permohonan Berdasarkan data sistem perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik (OSS) per tanggal 26 Mei 2026, permohonan Bapak atas nama Perorangan Irwan Syahputra (NIB: 0605260024665) dengan jenis kegiatan usaha utama Pengembangbiakan Ikan Bersirip (Pisces) yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES (KBLI 03271) telah tercatat di dalam sistem. 2. Alur Proses Penerbitan Kode Billing / PNBP Kode billing PNBP tidak terbit secara otomatis saat permohonan diajukan, melainkan diterbitkan setelah melalui tahapan evaluasi dokumen teknis: Tahap 1: Verifikasi Kelengkapan Persyaratan Berkas Petugas verifikator (Direktorat Jenderal Pengelolaan	Selesai	10 Juni 2026	
5	#02609101212859	Whatsapp	09 Juni 2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi mengenai KBLI untuk SIPJI LN jenis coral				Admin hotline setditjen PK telah memberikan informasi bahwa KBLI untuk karang dapat dipilih sesuai sumbernya, yakni 03154 (pengambilan dari alam) atau 03274 (hasil pengembangbiakan)	Selesai	09 Juni 2026	
6	#02609101301245	Whatsapp	09 Juni 2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi mengenai tidak bisa mendaftar akun SAJI				Admin hotline setditjen PK telah memberikan informasi bahwa pemrakarsa perlu memiliki SIPJI terlebih dahulu untuk dapat melakukan pendaftaran akun SAJI. SIPJI dapat dimohonkan melalui OSS. Alur dan prosedur pendaftaran SIPJI telah disampaikan kepada pemrakarsa	Selesai	09 Juni 2026	
7	#02609101453907	Whatsapp	09 Juni 2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK mendapat permintaan informasi mengenai cara penggantian nama pada akun SAJI				Admin hotline setditjen PK telah memberikan informasi bahwa terkait penggantian nama dapat dilakukan oleh tim teknis. Admin hotline setditjen PK telah berkoordinasi dengan tim teknis untuk mengganti nama pada akun pemrakarsa	Selesai	09 Juni 2026	
8	#02609101527846	Whatsapp	09 Juni 2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK telah mendapatkan permintaan informasi mengenai kapan pengumuman kelulusan KNMP				Admin hotline setditjen PK telah memberikan informasi bahwa terkait KNMP mohon berkenan menghubungi Contact Center di nomor 0821-1814-0960.	Selesai	09 Juni 2026	
9	#02609101609368	Whatsapp	09 Juni 2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK mendapat permintaan informasi mengenai kontak PIC user lab atau pengadaan (nomor WhatsApp) agar dapat berdiskusi lebih lanjut terkait kebutuhan alat dan penawaran				Admin hotline setditjen PK telah memberikan informasi bahwa terkait hal tersebut dapat melalui situs berikut https://spse.inaproc.id/kkp .	Selesai	09 Juni 2026	

10	#66826090708392	LAPOR!	9 Juni 2026	Permintaan Informasi	Irwan syahputra izin bertanya terkait surat izin pemanfaatan jenis ikan (SIPJI) setelah melakukan pembayaran PNPB berapa lama kah keluar izin nya, di status sistem OSS Bukti bayar sudah diterima dan akan diverifikasi oleh k/l - Verifikator (Menteri Kelautan dan Perikanan). Terimakasih				Yth. Bapak Irwan Syahputra Menindaklanjuti pertanyaan lanjutan Bapak mengenai jangka waktu penerbitan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) setelah dilakukannya pembayaran PNPB dan status di sistem OSS yang menunjukkan "Bukti bayar sudah diterima dan akan diverifikasi oleh K/L-Verifikator", bersama ini kami sampaikan penjelasan sebagai berikut: 1. Konfirmasi Status Pembayaran Kami mengonfirmasi bahwa bukti pembayaran PNPB yang Bapak unggah pada tanggal 9 Juni 2026 telah masuk ke dalam sistem perizinan. Status "Bukti bayar sudah diterima dan akan diverifikasi oleh K/L-Verifikator" menandakan bahwa transaksi pembayaran Bapak telah tercatat secara sah di Simponi (Kementerian Keuangan) dan saat ini berkas permohonan telah kembali ke antrean verifikator teknis untuk dilakukan validasi akhir. 2. Estimasi Waktu Penerbitan Izin (SLA) Sesuai dengan regulasi dan standar pelayanan perizinan berusaha untuk skala Usaha Mikro dengan Tingkat Risiko: Tinggi pada komoditas ini: • Jangka Waktu Maksimal: Total waktu penyelesaian dokumen sejak awal verifikasi hingga izin diterbitkan adalah 17 Hari Kerja.	Selesai	12 Juni 2026	
11	#67126170956273	LAPOR!	17 Juni 2026	Permintaan Informasi	Dugaan Kejanggalan Pengadaan Barang (iPhone & iPad) atas nama KKP. Kronologi Singkat: 30 Desember 2025: Pelapor dihubungi oleh Ibu Dhiya yang mengaku dari KKP Bogor untuk pengadaan 20 unit iPhone 17 Pro Max 256GB dan 2 unit iPad Pro 11 inch M5 menggunakan skema dana CSR (Penunjukan Langsung/tanpa Inaproc). 7 Januari 2026: Pelapor mengirimkan penawaran harga/RAB sebesar Rp665.000.000 dengan lokasi pengiriman yang dialihkan ke KKP Jakarta (Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil). 9 Januari 2026: Terbit surat pesanan/kontrak atas nama Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditandatangani oleh M. Faisal Reza. 26 Januari 2026: Pelapor telah mengirimkan seluruh barang sesuai dengan instruksi ke alamat KKP Jakarta. 12 Februari 2026: Pelapor meminta BAST dan NPWP, namun diberikan NPWP atas nama Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut oleh Ibu Shofa (Penanggung Jawab Project), dengan alasan dana bersumber dari CSR/ABT Garam/Hibah LN. Maret 2026: Hingga 6 Maret 2026, pencairan dana belum terealisasi dengan alasan dokumen masih dalam				Sehubungan dengan kronologis laporan pengadaan 20 unit iPhone 17 Pro Max 256GB dan 2 unit iPad Pro 11 inch M5 dengan total nilai kontrak Rp665.000.000 yang mengatasnamakan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), bersama ini kami sampaikan penjelasan sebagai berikut: 1.Pengadaan Barang tersebut tidak ada, kami menegaskan bahwa tidak ada paket pekerjaan pengadaan barang tersebut di lingkungan KKP maupun DJPK. Dokumen Kontrak/Surat Pesanan, BAST, serta nomor NPWP yang diberikan oleh oknum yang bersangkutan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 2. Penyalahgunaan Identitas Instansi, oknum-oknum yang menghubungi Saudara (mengaku sebagai Ibu Dhiya, Ibu Shofa, maupun pencantuman nama pejabat penandatanganan) bukan merupakan perwakilan resmi, pejabat pengadaan, ataupun pegawai kami yang memiliki wewenang untuk melakukan pengadaan barang tersebut. Kami mengimbau agar Saudara menghentikan segala bentuk komunikasi dan tidak melakukan penyerahan barang atau dana apa pun kepada oknum tersebut. 3.Perlu ditegaskan bahwa nama M. Faisal Reza bukan menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan tidak terlibat dalam pengajuan pengadaan barang, nama tersebut dicantumkan secara sepihak oleh oknum Ibu Farah Dhiya.	Selesai	22 Juni 2026	
12	#02622100602926	Whatsapp	22 Juni 2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi mengenai cara impor buaya yang dilindungi				Admin hotline setditjen PK telah memberikan informasi bahwa izin edar untuk buaya maka perlu memiliki SIPJI Perdagangan Luar Negeri terlebih dahulu untuk dapat membuat SAJI Luar Negeri (impor). Jika belum memiliki SIPJI Perdagangan Luar Negeri atau izin edar untuk buaya maka belum dapat mengajukan SAJI Luar Negeri (impor). Terima kasih	Selesai	22 Juni 2026	

13	#25372622100646	Whatsapp	22 Juni 2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi apakah komoditi cangkang kerang Capiz dengan nama ilmiah Placuna Placenta termasuk dalam hewan yang dilindungi				Admin hotline setditjen PK telah memberikan informasi bahwa untuk jenis Placuna Pacenta tidak termasuk dalam jenis biota yang dilindungi ataupun termasuk Appendiks CITES sehingga tidak diperlukan izin pemanfaatan dari KKP	Selesai	22 Juni 2026	
14	#25372622100728	Whatsapp	22 Juni 2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi apakah dalam pengurusan SIPJI LN dapat dimasukan 2 alamat pada 1 NIB				Admin hotline setditjen PK telah memberikan informasi bahwa untuk 2 alamat dapat dilakukan pada saat pengajuan permohonan di OSS	Selesai	22 Juni 2026	
15	#25372622100812	Whatsapp	22 Juni 2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi untuk point nomor 4 pada permohonan SIPJI di OSS harus diisi dengan dokumen apa?				Admin hotline setditjen PK telah memberikan informasi bahwa pada point nomor 4 dapat diisi dengan dengan surat kesedian membayar PNPB.	Selesai	22 Juni 2026	
16	#25572622100956	Whatsapp	22 Juni 2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi kbli mana yang harus digunakan apakah KBLI 2020 yaitu 03151 atau KBLI saat ini di 2025 yaitu 03110 dan 03120?				Admin hotline setditjen PK telah memberikan informasi bahwa KBLI saat ini sudah terdapat konversi di OSS sehingga dapat megggunakan KBLI yang baru yakni 03110 atau 03120	Selesai	22 Juni 2026	
17	#25372622101047	Whatsapp	22 Juni 2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi untuk permohonan SIPJI pengembangbiakan ex situ komoditi karang hias, proses apa saja yang harus dilakukan				Admin hotline setditjen PK telah memberikan informasi untuk kegiatan pengembangbiakan diperlukan SIPJI Pengembangbiakan. Pengajuan permohonan SIPJI di OSS menggunakan KBLI baru 2025, yakni 03214 untuk karang hasil pengembangbiakan. Sebelum pengajuan SIPJI di OSS, pelaku usaha perlu memiliki BAP Verifikasi Lapang, dalam pembuatan berita acara verifikasi lapang, silakan pelaku usaha menghubungi tim UPT PK terdekat lokasi usaha. Format dokumen persyaratan SIPJI dapat akses link berikut https://bit.ly/persyaratan-sipji .	Selesai	22 Juni 2026	
18	#25372622101150	Whatsapp	22 Juni 2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi mengenai KBLI pengganti untuk KBLI 03151				Admin hotline setditjen PK telah memberikan informasi bahwa KBLI 03151 dan 03274 saat ini sudah terkonversi di OSS sehingga dapat menggunakan KBLI yang baru yakni 03110 (dari alam) atau 03214 (dari pengembangbiakan)	Selesai	22 Juni 2026	
19	#25372622101235	Whatsapp	22 Juni 2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi mengenai daftar ulang pemanfaatan sedimentasi blok prioritas				Admin hotline setditjen PK telah memberikan informasi mengenai prosedur pengajuan izin pemanfaatan pasir laut	Selesai	22 Juni 2026	

20	#25372629094931	Whatsapp	29/06/2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi apakah KBLI 03151 sudah berubah menjadi KBLI baru				Admin hotline setditjen PK telah memberikan informasi bahwa KBLI 03151 saat ini sudah terkonversi di OSS sehingga dapat menggunakan KBLI yang baru yakni 03110 (dari alam) atau 03214 (dari pengembangbiakan).	Selesai	29 Juni 2026	
21	#25372629095008	Whatsapp	29/06/2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi mengenai perizinan ALSE				Admin hotline setditjen PK telah memberikan jawaban seperti berikut: Q :1. Apakah dalam praktiknya 1 izin ALSE yang dimiliki oleh satu PT dapat digunakan oleh PT lain dalam satu grup/afiliasi untuk kebutuhan operasional internal (non-komersial), atau setiap PT wajib memiliki izin ALSE masing-masing? A : Pada prinsipnya perpindahan air antar entitas berbeda merupakan kegiatan komersil. 1 Izin ALSE dapat dipakai untuk beberapa perusahaan, namun pemegang izin akan dikenakan tarif PNPB komersil atas penggunaan air. Q: 2. Apabila terjadi perubahan kepemilikan saham sehingga hubungan afiliasi menjadi tidak jelas atau tidak lagi memenuhi kriteria afiliasi, apakah PT yang menggunakan air laut tersebut wajib mengurus izin ALSE sendiri secara terpisah? A : hubungan afiliasi tidak antar entitas tetap masuk kategori komersil, karena ada tranfer pricing antar afiliasi yang tercatat di pembukuan masing2. Q: 3. Jika diperbolehkan penggunaan dalam satu grup/afiliasi, mohon penjelasan mengenai definisi afiliasi yang diakui dalam konteks izin ALSE (misalnya anak perusahaan, pengendalian yang sama, common control, atau kriteria lainnya). A: hubungan afiliasi tidak antar entitas tetap masuk kategori komersil, karena ada transfer pricing antar afiliasi yang tercatat di pembukuan masing2.	Selesai	29 Juni 2026	
22	#02629095124251	Whatsapp	29/06/2026	Permintaan Informasi	Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi mengenai permohonan SIPJI yang sudah ditolak di OSS, kenapa tidak bisa upload perbaikan dokumen?				Admin hotline setditjen PK telah menginformasikan untuk permohonan yang sudah ditolak maka untuk pengajuannya perlu melakukan kembali dari awal. Silahkan dapat mengajukan kembali	Selesai	29 Juni 2026	
23	#11026290427395	LAPOR!	29/06/2026	Permintaan Informasi	Penerbitan Billing Pembayaran Pengurusan Permohonan SIPJI Perdagangan Ikan Arwana Pada tgl 09 Juni 2026, saya atas nama Darmayandi sudah mengajukan pengurusan permohonan SIPJI Perdagangan ikan Arwana di laman OSS. Dari informasi pihak LPKP (Loka Pengelolaan Kelautan Pekanbaru) mengatakan jika permohonan setelah sudah diinput di OSS maka akan di proses ketahapan selanjutnya yaitu penerbitan billing pembayaran dengan estimasi waktu paling lama 21 hari. Namun sekarang sudah memasuki hari ke-20, tetapi biling pembayaran masih belum keluar. Dengan ini kami memohon informasi kejelasannya. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terimakasih.				Yth. Bapak/Ibu Darmayandi, Terima kasih telah menyampaikan pertanyaan dan aspirasi Bapak melalui layanan LAPOR! Menindaklanjuti laporan Bapak/Ibu mengenai keterlambatan penerbitan billing pembayaran untuk permohonan SIPJI Perdagangan Ikan Arwana yang diajukan pada tanggal 09 Juni 2026, dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut: 1. Permohonan Bapak/Ibu saat ini sedang dalam proses verifikasi administratif dan teknis oleh tim terkait. 2. Proses penerbitan billing pembayaran akan segera diproses setelah seluruh tahapan verifikasi dokumen dan persyaratan teknis dinyatakan lengkap dan sesuai. Kami berkomitmen untuk mempercepat proses ini agar tidak melebihi estimasi waktu yang telah disampaikan sebelumnya. Mohon kesediaan Anda untuk menunggu proses verifikasi tersebut selesai. Kami memahami urgensi waktu yang Anda sampaikan, dan saat ini status permohonan Anda terus diproses sesuai dengan urutan yang masuk dalam sistem. Anda dapat memantau perkembangan status permohonan secara berkala melalui akun OSS Anda. Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.	Selesai	2 Juli 2026	



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ditjenpk@kkp.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG
TIM PENANGANAN PENGADUAN UNIT KERJA ESELON I
DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2020 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan tentang Tim Penanganan Pengaduan Unit Kerja Eselon I dan Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2020 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1224);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN TENTANG TIM PENANGANAN PENGADUAN UNIT KERJA ESELON I DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN.**

- KESATU : Menetapkan Tim Penanganan Pengaduan Unit Kerja Eselon I dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan yang selanjutnya disebut Tim PP Unit Eselon I dan UPT DJPK.
- KEDUA : Tim PP Unit Eselon I dan UPT DJPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Pelaksana Unit Kerja Eselon I, dan Pelaksana Unit Pelaksana Teknis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KETIGA : Tim PP Unit Eselon I dan UPT DJPK sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:
- A. Pengarah
memberikan arahan dan bimbingan kepada Penanggung Jawab dan Pelaksana dalam rumusan kebijakan dan pengambilan langkah-langkah strategis bagi pelaksanaan tata kelola kinerja organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.
 - B. Penanggung Jawab
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penanganan pengaduan.
 - C. Pelaksana pada Unit Kerja Eselon I
 1. melakukan koordinasi penanganan pengaduan dengan Tim Penanganan Pengaduan Kementerian dan Tim Penanganan Pengaduan Unit Pelaksana Teknis;
 2. memberikan respon awal terhadap penyelesaian pengaduan sesuai kewenangannya;
 3. memantau tindak lanjut penyelesaian pengaduan sesuai kewenangannya;
 4. melakukan komunikasi, koordinasi, dan pemberian informasi penyelesaian pengaduan sesuai kewenangannya;
 5. mengumpulkan bahan dan keterangan yang relevan dengan pengaduan;
 6. menerima pengaduan untuk disampaikan ke Admin Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) pada Unit Kerja Eselon I;
 7. melakukan verifikasi lanjutan atas pengaduan;
 8. melakukan telaah atas pengaduan yang diterima;
 9. menyampaikan hasil telaah dan pengumpulan bahan dan keterangan dalam bentuk rekomendasi tindak lanjut penyelesaian pengaduan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I;
 10. melakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal terkait hasil pengumpulan bahan dan keterangan; dan
 11. membuat laporan penyelesaian pengaduan secara berkala 1 (satu) kali setiap bulan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I.
 - D. Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis
 1. melakukan koordinasi penanganan pengaduan dengan Tim Penanganan Pengaduan Kementerian dan Tim Penanganan Pengaduan Unit Kerja Eselon I;

2. memberikan respon awal terhadap penyelesaian pengaduan sesuai kewenangannya;
3. memantau tindak lanjut penyelesaian pengaduan sesuai kewenangannya;
4. melakukan komunikasi, koordinasi, dan pemberian informasi penyelesaian pengaduan sesuai kewenangannya;
5. mengumpulkan bahan dan keterangan yang relevan dengan pengaduan;
6. menerima pengaduan untuk disampaikan ke Admin Unit Penyelenggara Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis;
7. melakukan verifikasi lanjutan atas pengaduan;
8. melakukan telaah atas pengaduan yang diterima;
9. menyampaikan hasil telaah dan pengumpulan bahan dan keterangan dalam bentuk rekomendasi tindak lanjut penyelesaian pengaduan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis;
10. melakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal terkait hasil pengumpulan bahan dan keterangan melalui Tim Penanganan Pengaduan Unit Kerja Eselon I; dan
11. membuat laporan penyelesaian pengaduan secara berkala 1 (satu) kali setiap bulan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Tim PP Unit Eselon I dan UPT DJPK mengacu pada mekanisme kerja penanganan pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

KELIMA : Masa kerja Tim PP Unit Eselon I dan UPT DJPK sebagaimana dimaksud diktum KESATU terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini sampai dengan 31 Desember 2026

KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun Anggaran 2026.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Januari 2026

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN,

ttd.

A. KOSWARA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan,

Miftahul Huda



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG TIM PENANGANAN
PENGADUAN UNIT KERJA ESELON I
DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENANGANAN PENGADUAN UNIT KERJA
ESELON I DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN

- A. Pengarah
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan
- E. Penanggung Jawab
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
 2. Direktur lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
 3. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.
- F. Pelaksana pada Unit Kerja Eselon I

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dedhy Wibowo Setiawan, Analis SDM Aparatur Ahli Madya, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	Ketua
2.	Irfan Hadi Nursanto, Penata Perizinan Ahli Muda, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	Wakil Ketua/ Admin UPP Eselon I
3.	Leri Nuriadi, Pranata Humas Ahli Muda, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	Sekretaris
4.	Titus Pramono, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Madya, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	Anggota
5.	Ajar Buditama, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	Anggota
6.	Iqbal Suhaemi Gultom, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda, Direktorat Sumber Daya Kelautan	Anggota
7.	Untung, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda, Direktorat Sumber Daya Kelautan	Anggota
8.	Hendra Nurcahyo, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda, Direktorat Jasa Bahari	Anggota
9.	Afifah Aghnia Mirrah, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama, Direktorat Jasa Bahari	Anggota
10.	Marines Febriani, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama, Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Anggota

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
11.	Anggia Rivani, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama, Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Anggota
12.	Arief Fajar Fitriani, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama, Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	Anggota
13.	Raditya Wahyu Prihardianto, Ahli Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama, Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	Anggota
14.	Fajar Renita Sitinjak, Ahli Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda, Direktorat Konservasi Ekosistem	Anggota
15.	Julham M.S Pelupessy, Ahli Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda, Direktorat Konservasi Ekosistem	Anggota

G. Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis

1. Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Graziano Raymond P, Kepala Subbagian Umum	Ketua
2.	Hanizam, Penata Perizinan Ahli Muda	Wakil Ketua
3.	Prio Sambodo, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Sekretaris /Admin UPP UPT
4.	Putra Muhammad Abdillah, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Anggota
5.	Ardiansah, Penata Layanan Operasional	Anggota
6.	Muhamad Wahyu Al Hadi, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Anggota
7.	Achmad Riswanto, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Anggota
8.	Amak Priyatna, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda	Anggota
9.	Amalia Alfiana Chairani, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Anggota
10.	Wawan Kurniawan, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Anggota
11.	Kasihartadi, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama	Anggota

2. Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Anang Tri Jayanto Mulyo, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda	Ketua

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
2.	Muji Wasis Indriyawan, Analis Konservasi dan Rehabilitasi Wilayah Pesisir	Wakil Ketua
3.	Kiki Riski Arisandy, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda	Anggota
4.	Dewi Retnoningrum, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda	Anggota
5.	Nurhamdani, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda	Anggota
6.	Muhammad Dikyah Fadillah, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Anggota
7.	Aditya Hidayatullah, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Anggota
8.	Dewa Gde Tri Bodhi Saputra, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Anggota
9.	Martanina, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda	Anggota
10.	Moh. Yasir, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Anggota
11.	Mochammad Miftakhul Mashuda, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Admin UPP UPT

3. Balai Pengelolaan Kelautan Kupang

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Amos Moi Ponggalo, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda	Ketua
2.	Didi Ahmadi, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama	Sekretaris/ Admin UPP UPT
3.	Windu Merdekawati, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Anggota
4.	Ferdinand Irianto P. B, Analis Konservasi Kawasan	Anggota
5.	Catur Iswayudi, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Anggota
6.	Jamaludin, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Anggota
7.	Muhammad Alwan M.R, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Anggota

4. Loka Pengelolaan Kelautan Pekanbaru

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Samsul Bahri, Penata Perizinan Ahli Muda	Ketua
2.	Ronald Raditya Kesatria Sinaga, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Sekretaris
3.	Leonard U. M. Simbolon, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Anggota
4.	Dina San Aprisca Tarigan, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Anggota

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
5.	Wahyu Rianto, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Anggota
6.	Lovedrian Ariston, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda	Anggota
7.	Ignatius Tri Hantoro, Penelaah Teknis Kebijakan	Admin UPP UPT

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN
RUANG LAUT,

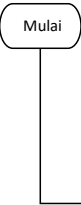
ttd.

A. KOSWARA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan,


Miftahul Huda

 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN	Nomor SOP	22 /DJPK.1/OT.310/VIII/2025
	Tgl Pembuatan	Agustus 2024
	Tgl Revisi	Agustus 2025
	Tgl Efektif	Agustus 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN	Disahkan oleh	Sekretaris Ditjen PK  Dr. Miftahul Huda, M.Si NIP.197311302001121001
		Nama SOP
Dasar Hukum - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kualifikasi Pelaksana - Memiliki kemampuan komunikasi yang baik - Memiliki pemahaman yang baik terkait peraturan perundang-undangan pelayanan publik - Menguasai pengoperasian aplikasi komputer terutama office dan internet - Memiliki kompetensi administrasi	
Keterkaitan - SOP Penerimaan Surat - SOP Pemutakhiran Informasi Publik	Peralatan/Perlengkapan Alat Pengolah Data dan Ruang Pelayanan beserta fasilitasnya	
Peringatan Wajib menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan terlapor	Pencatatan dan Pendataan - Website LAPOR - Laporan Hasil Penanganan Pengaduan	

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Admin UPP Eselon I	Ketua TPP Eselon I	Anggota TPP Eselon I	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan: a. penerimaan, input dan pengelolaan melalui SPAN-LAPOR! b. verifikasi awal atas pengaduan c. merespon langsung pengaduan bersifat aspirasi d. meneruskan kepada Admin Kementerian, jika pengaduan bukan wewenang unit kerja				Berkas aduan	3 hari	1. Berkas pengaduan 2. Print screen laporan pengaduan dari laman SP4N-LAPOR!	a. Kelengkapan Pengaduan mulai dari identitas pelapor, subansi Pengaduan, pihak yang terlibat, waktu kejadian, tempat kejadian, kronologis kejadian sampai data dukung Pengaduan yang diterima b. Saluran resmi Pengaduan di lingkungan Kementerian untuk Masyarakat meliputi: 1) website dengan laman www.kkp.lapor.go.id atau www.lapor.go.id; 2) surat nonelektronik ditujukan kepada Ketua TPPEselon I/UPT dan Pengaduan secara langsung (tatap muka) dengan alamat kantor unit kerja masing-masing 3) kotak Pengaduan yang disediakan di Kantor Pusat dan UPT di lingkungan Kementerian c. Proses penerusan pengaduan yang bukan wewenang unit kerja kepada admin kementerian sesuai dengan SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat tingkat Kementerian
2	Menerima dan mempelajari informasi/berkas pengaduan dari admin UPP Eselon I/UPT serta mendisposisikan kepada anggota TPP				1. Berkas pengaduan 2. Print screen laporan pengaduan dari laman SP4N-LAPOR!	2 hari	Disposisi/ Surat Tugas	
3	a. Melakukan Verifikasi lanjutan atas pengaduan (kelengkapan 4 W+1 H) dan pengumpulan bahan dan keterangan, apabila terdapat kekurangan informasi/data atas pengaduan, anggota TPP dapat meminta informasi/data tambahan melalui admin b. Menyusun dan menyampaikan hasil telaah atas pengaduan yang memuat penetapan kategori pengaduan dan penyelesaian tindak lanjut atas: - Permintaan Informasi- Pengaduan tidak berkadar pengawasan- Pengaduan berkadar pengawasan				Disposisi/ Surat Tugas	6 hari	1. Laporan Hasil Telaah (termasuk hasil pengumpulan bahan dan keterangan) 2. Jawaban atas pengaduan.	a. Proses pengumpulan bahan dan keterangan sesuai dengan SOP Pulbaket lingkup Eselon I/UPT masing-masing b. Kategori pengaduan terdiri dari permintaan informasi dan Pengaduan yang bersifat normatif diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari; Pengaduan yang tidak berkadar pengawasan diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari; dan Pengaduan yang berkadar pengawasan diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari, kecuali terdapat Keadaan Kahar;
4	a. Menerima dan menyusun jawaban atas pengaduan berdasarkan hasil telaah dan diteruskan ke Admin UPP. b. Meneruskan pengaduan kepada Admin Kementerian apabila hasil telaah pengaduan berkadar pengawasan dan pengaduan bukan wewenang unit kerja				Laporan Hasil Telaah/Jawaban atas Pengaduan	2 hari	Disposisi/ Surat Jawaban atas pengaduan	Proses tindak lanjut pengaduan yang dilimpahkan kepada Admin Kementerian sesuai dengan SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat tingkat Kementerian
5	a. Menerima jawaban/tindaklanjut; b. Menginput jawaban/tindak lanjut pengaduan ke sistem/aplikasi SP4N-LAPOR!.				Disposisi/ Surat Jawaban atas pengaduan	1 hari	Print screen laporan pengaduan di laman SP4N-LAPOR!	Proses penerimaan pengaduan yang dilimpahkan kepada Admin Kementerian sesuai dengan SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat tingkat Kementerian